



LKIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Triwulan II Tahun 2025**

**Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur
Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321423 Fax (0474) 321423**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan II Tahun 2025 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 telah selesai.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan II Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sepanjang Triwulan II Tahun 2025 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021-2026. Selain itu, Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan II Tahun 2025 juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perindustrian Triwulan II Tahun 2025.

iii Berkat dukungan dan kerja keras seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian secara umum target pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kendala yang menyebabkan target belum tercapai secara optimal.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan II Tahun 2025 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, saya selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini.

Malili, Juni 2025
KEPALA DINAS,

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19751001 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1.3 Sumber Daya Aparatur.....	7
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah.....	8
1.5 Landasan Hukum.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	12
2.2 Tujuan dan Rencana Strategis.....	13
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2 Analisa Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.3 Analisa Efisiensi Sumber Daya.....	36
3.4 Analisis Sebab Keberhasilan/Kegagalan.....	38
3.5 Realisasi Anggaran.....	102
BAB IV PENUTUP.....	115
4.1 Kesimpulan.....	115
4.2 Saran.....	116
4.3 Rencana Tindak Lanjut	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir Triwulan anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dan tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- e. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan;
- f. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perdagangan;

3

- d. Bidang Koperasi;
- e. Bidang UMKM;
- f. Bidang Perindustrian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Sekretariat adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1.1 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- 1.2 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- 1.3 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan

1.4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Perdagangan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kmetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kmetrologian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Koperasi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

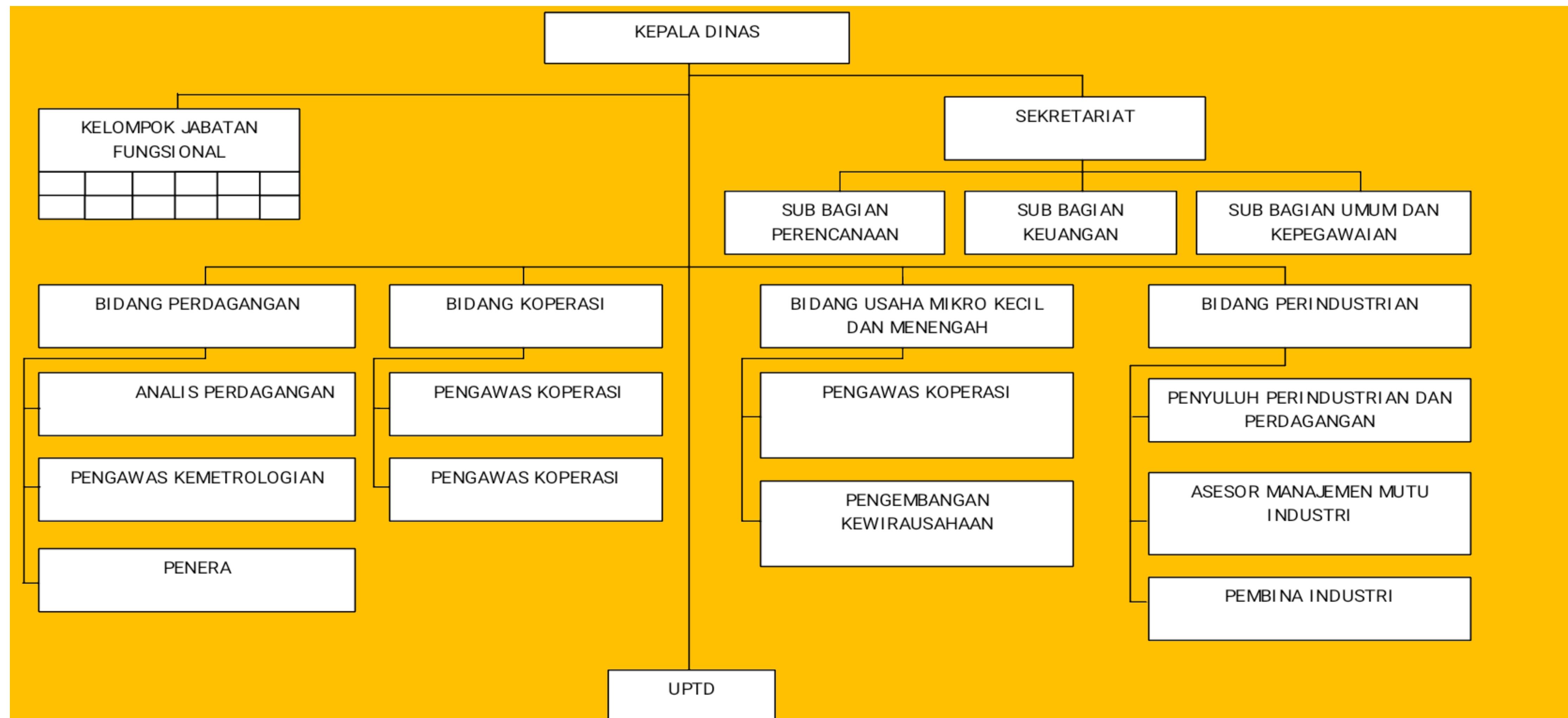
Tugas Perindustrian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;

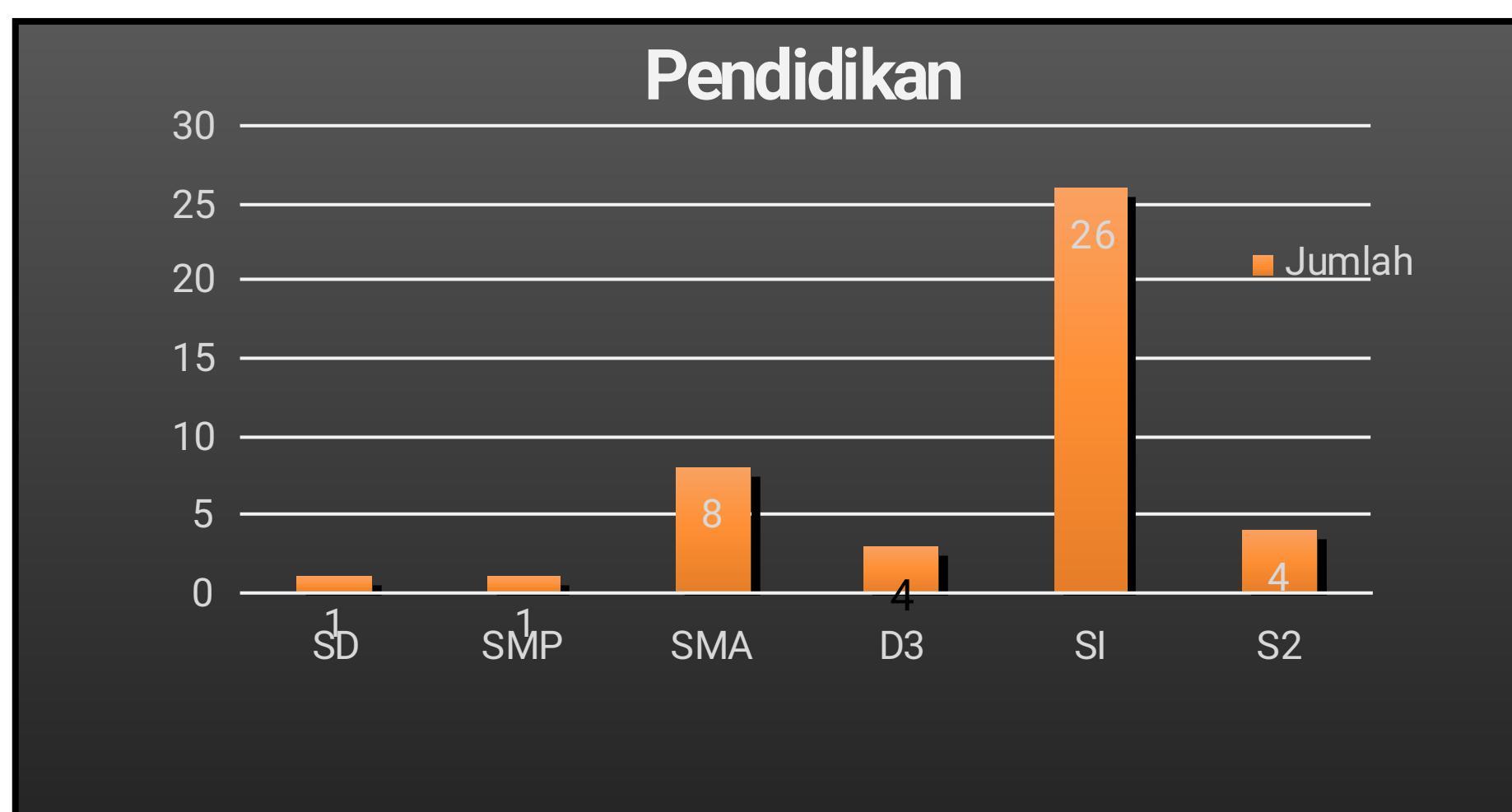
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN



1.3 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2025 sebanyak 43 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 27 ASN, 5 orang PPPK dan tenaga upah jasa sebanyak 11 orang. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

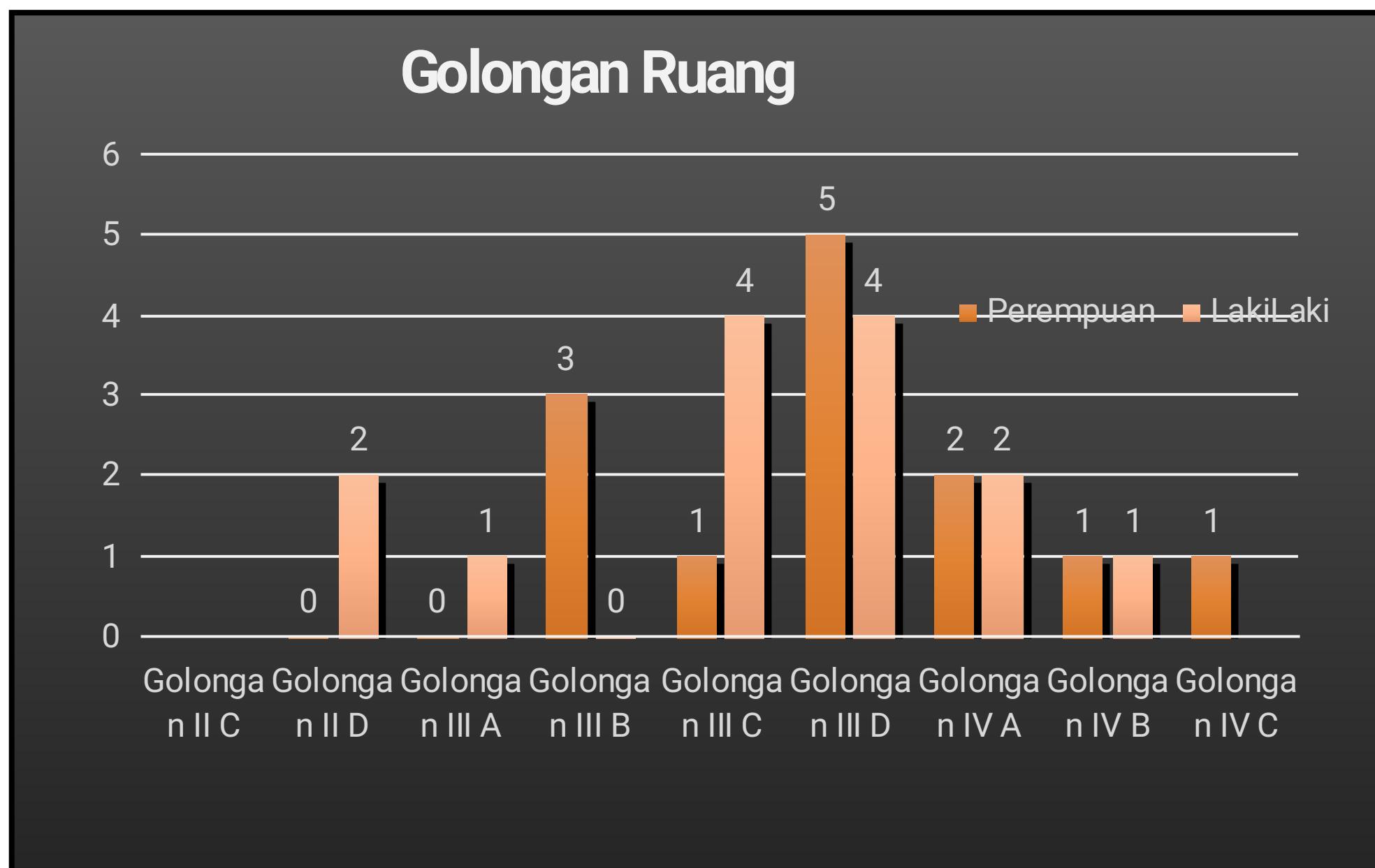


Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (orang)

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.



Grafik 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (orang)

Sumber : Sub Bagian Umum dan kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur

1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis, antara lain:

Isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian :

- Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
 - Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM.
 - Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas.

3. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan.
 4. Sistem pengelolaan usaha ritel yang merajelala yang mempengaruhi usaha ritel koperasi.
 5. Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM
 6. Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 7. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.
- b. Bidang Perdagangan :
1. Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah.
 2. Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi.
 3. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menerapkan Ulang Tahun Perdagangan (UTTP) yang dimiliki.
 4. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan ekspor dan impor .
- c. Bidang Perindustrian :
1. Masih rendahnya produktifitas IKM.
 2. Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM.
 3. Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk IKM.
 4. Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan pelaku IKM.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

I.6 Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2021 – 2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan II Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

13

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sesuai dengan RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

VISI

**“ Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-2 (dua) dan misi ke-4 (enam)*** dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI II

**“ Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing
dan Berjaringan Luas ”**

MISI IV

**“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang
Lebih Baik”**

Merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam

14

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur untuk menciptakan "**Perekonomian yang Berdaya Saing**".

II.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : "*Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelaanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya*"

Misi II : "*Mengembangkan Ekonomi Daerah Yang Berbudaya Saing dan Berjaring Luas*"

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan UMKM	Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : "*Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelaanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya*"

Misi IV: "Menciptakan Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan UMKM	Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan nilai produksi IKM - Pertumbuhan nilai produksi UMKM - Persentase Koperasi aktif - Pertumbuhan sub sektor perdagangan

II.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025 pada Dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

II.4 RENCANA ANGGARAN DISDAGKOPRINUM TAHUN 2025

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp. 29.136.784.445** - (*Dua puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.874.390.897,-
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 21.523.850,-
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 80.343.200,-
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 49.591.700,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 26.527.100,-
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 272.339.000,-

17

7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 176.882.000,-
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 22.095.118.324,-
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 455.643.156,-
10	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 224.600.418,-
11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 86.013.000,-
12	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Rp. 439.796.550,-
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 15.543.000,-
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 18.253.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

18

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama triwulan II. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

III.1 CAPAIAN KINERJA ORANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan

	2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
	3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
	4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
	5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
	6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
	7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

III.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap

perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Tabel. 1
Capaian Kinerja I Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Percentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun	100%	106,87%	106,87%

1.1 Capaian Sasaran Strategis 1 :

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Variabel pengukuran dalam meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang didukung oleh 1 (satu) variabel pengukuran yaitu :

- a. Kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Stabilitas harga barang 9 (Sembilan) kebutuhan pokok untuk 39 jenis komoditi pada triwulan II tahun 2025 terjaga dan relatif tidak bergejolak hal ini tidak terlepas dari upaya dinas perdagangan dalam melakukan pemantauan langsung (real time) harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan kab.Luwu Timur. Dengan adanya pemantauan tersebut maka berbagai perubahan yang dinilai signifikan

terhadap harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan dapat direspon dengan cepat. Stabilisasi harga kebutuhan pokok diwilayah luwu timur khususnya juga didukung oleh penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) antara produsen dan distributor. Rendahnya disparitas harga antar kecamatan diwilayah kabupaten luwu timur dapat dipersepsikan bahwa kesenjangan daya beli masyarakat antar kecamatan di kabupaten luwu timur semakin kecil dengan tingkat harga yang mendekati sama.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

■ **Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun**

- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 1
Realisasi Indikator Sasaran I Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun	100%	106,87%	106,87%

Penjelasan:

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pertama “ *Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting* ” triwulan II tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting diukur dengan ketersediaan barang pokok dan barang penting sepanjang tahun.

Barang pokok dan barang penting yang dimaksud meliputi beras, gula pasir, minyak goreng/mentega , daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, sayuran dan buah-buahan, garam beryodium, gas elpiji 3 kg, solar dan pertalite. Triwulan II pada tahun 2025, realisasi kinerja untuk persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun mencapai 106,87% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 106,87%. Pencapaian kinerja untuk sasaran strategis 1 mencapai angka diatas 100% disebabkan stok barang pokok sepanjang triwulan II tahun 2025 yang meliputi beras, gula pasir, minyak goreng/mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, garam beryodium serta barang penting yaitu pertalite melebihi kebutuhan masyarakat sedangkan jenis BBM berupa solar mengalami kekurangan sebesar 10,48% atau dihitung menggunakan liter kurang sebanyak 679.410 liter. Hal ini tergambar pada tabel dibawah :

DAFTAR KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	URAIAN	STOK	KEBUTUHAN	%
1	2	3	4	5 = (3/4)x100%
Triwulan II (April)				
A	SEMBAKO			
1	Beras	3.372Ton	2.249 Ton	149,93%
2	Gula Pasir	215 Ton	214 ton	100,47%
3	Minyak Goreng/Mentega	155.587 kg	145.191 kg	107,16%
4	Daging Sapi dan Ayam	43 Ton	42 Ton	102,38%
5	Telur Ayam	3.227.895 butir	3.214.954 butir	100,40%
6	Susu	654.285 kg	642.923 kg	101,77%
7	Sayuran dan Buah-buahan	829.794 kg	828.987 kg	100,11%
8	Garam Beryodium	10 ton	9 ton	111,11%

23	9	Gas LPG 3 Kg	320.040 Tabung	320.040 Tabung	100%
	B	BBM SUBSIDI			
					89,51%
	1	Solar	1.933.530 liter	2.160.000 liter	
	2	Pertalite	2.792.340 liter	2.736.000 liter	102,06%
RATA-RATA APRIL TAHUN 2025					105,90%

NO	URAIAN	STOK	KEBUTUHAN	%
1	2	3	4	5 = (3/4)x100%
Triwulan II (Mei)				
A	SEMBAKO			
1	Beras	3.652 Ton	2.248 Ton	162,46%
2	Gula Pasir	215 Ton	214 ton	100,47%
3	Minyak Goreng/Mentega	155.869 kg	145.325 kg	107,26%
4	Daging Sapi dan Ayam	43 Ton	42 Ton	102,38%
5	Telur Ayam	3.223.273 butir	3.216.775 butir	100,20%
6	Susu	655.215 kg	645.775 kg	101,46%
7	Sayuran dan Buah-buahan	829.895 kg	829.543 kg	100,04%
8	Garam Beryodium	10 ton	9 ton	111,11%
9	Gas LPG 3 Kg	317.750 Tabung	317.750 Tabung	100%
B	BBM SUBSIDI			
				89,51%
1	Solar	1.933.530 liter	2.160.000 liter	
2	Pertalite	2.792.340 liter	2.736.000 liter	102,06%
RATA-RATA MEI TAHUN 2025				107,00%

NO	URAIAN	STOK	KEBUTUHAN	%
----	--------	------	-----------	---

1	2	3	4	5 = (3/4)x100%
Triwulan II				
(Juni)				
A	SEMBAKO			
1	Beras	3.843 Ton	2.251 Ton	170,72%
2	Gula Pasir	215 Ton	214 ton	100,47%
3	Minyak Goreng/Mentega	155.995 kg	145.553 kg	107,17%
4	Daging Sapi dan Ayam	44 Ton	43 Ton	102,33%
5	Telur Ayam	3.223.458 butir	3.216.992 butir	100,20%
6	Susu	655.372 kg	645.964 kg	101,48%
7	Sayuran dan Buah-buahan	826.118 kg	828.336 kg	99,85%
8	Garam Beryodium	10 ton	9 ton	111,11%
9	Gas LPG 3 Kg	320.880 Tabung	320.880 Tabung	100%
B	BBM SUBSIDI			
1	Solar	1.933.530 liter	2.160.000 liter	89,51%
2	Pertalite	2.792.340 liter	2.736.000 liter	102,06%
RATA-RATA JUNI TAHUN 2025				107,72%

Sasaran strategis 1 merupakan sasaran kinerja yang berkontribusi pada program penanggulangan kemiskinan. Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di masyarakat sangat mempengaruhi stabilisasi harga menjadi pondasi agar pertumbuhan ekonomi bisa tinggi dan berkesinambungan. Termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun sangat mempengaruhi stabilisasi harga di masyarakat.

Pencapaian positif ditunjukkan IKU 1 "Percentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun". Realisasi sebesar 106,87%,- dari target Triwulan II

Tahun 2025 sebesar 100%,- (persen capaian 106,87%). Realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun tersebut diperoleh dari formula:

(Kebutuhan barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan dibagi stok barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan) x 100%

Berdasarkan Renstra 2021-2026, pencapaian sasaran startegis I dapat digambarkan pada grafik dibawah :



- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2025 dengan TW II Tahun 2024**

Tabel. 2
Realisasi Indikator Sasaran I TW.2 Tahun 2025
(dibandingkan realisasi TW.2 Tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi TW.2 Tahun 2024	Realisasi TW 2. Tahun 2025
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	106,37%	106,87%

Penjelasan:

Triwulan II Tahun 2025, realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun sebesar 106,87%, sedangkan realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang untuk triwulan II tahun 2024 sebesar 106,37%. Kenaikan realisasi tahun 2025 sebesar 0,50% dibandingkan tahun 2024, karena semakin kecil pencapaian maka semakin baik karena harga cenderung stabil.

Jenis barang pokok dan barang penting yang dimaksud meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, telur ayam, susu, sayuran dan buah-buahan, garam beryodium, gas LPG, serta BBM.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 4
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi TW. II Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	106,87%	100%

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja triwulan II tahun 2025 sebesar 106,87% terhadap target akhir renstra sebesar 100% maka secara umum melampaui target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dengan peningkatan kinerja sebesar 6,87%. Peningkatan capaian kinerja dihitung dengan rumus formula :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Peningkatan capaian kinerja} &= (\text{Realisasi Indikator Kinerja Tahun } n - \\
 &\quad \text{Target Akhir Renstra}) \text{ dibagi } (\text{Target} \\
 &\quad \text{Akhir Renstra}) \times 100\% \\
 &= (106,87\% - 100\%) \\
 &\quad \underline{\hspace{10em}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

100%
= 6,87%

- **Perbandingan Capaian Kinerja TW. II Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Secara Nasional**

Tabel. 5
Capaian Indikator Sasaran TW. II Tahun 2025
(dibandingkan capaian secara nasional)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Capaian TW. II Tahun 2025	Capaian Nasional
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	106,87%	%

(sumber data :Laporan Kemendag periode April-Juni)

Penjelasan:

Berdasarkan neraca pangan strategis nasional periode April - Juni 2025, ketersediaan seluruh komoditi pangan pokok strategis stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlihat dengan laju pertumbuhan harga pangan triwulan II tahun 2025 masih terjaga dan terkendali.

Untuk Kabupaten Luwu Timur capaian kinerja persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di triwulan I tahun 2025 berada di angka 106,87% sedangkan untuk realisasi secara nasional berada di angka %. Belum Mendapatkan Data dari BPS triwulan II tahun 2025, juga didukung oleh realisasi koefisien harga barang kebutuhan pokok antar waktu secara nasional sebesar %.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I :

a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Sasaran program “ Terciptanya stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok yang diukur dengan formula :

$$KVpt = SnPx100\%,$$

$$KVpt = \frac{123.3243.667.090}{1250.272.73} \times 100\% \\ = 3,37\%$$

$KVpt$ = koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu;

Sn = Standar deviasi harga rata-rata kabupaten selama 1 tahun;

P = Rata-rata harga kabupaten barang kebutuhan pokok.

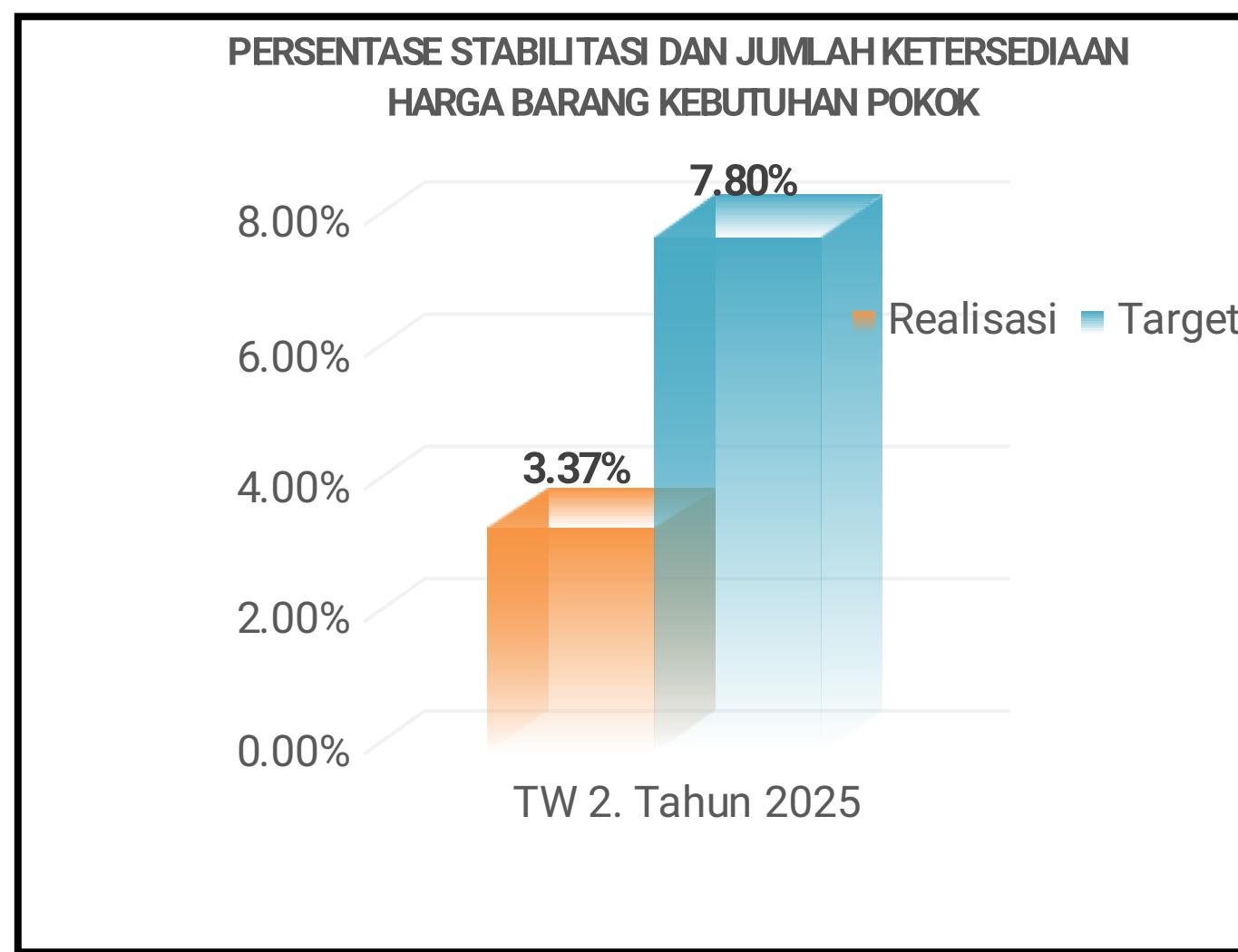
No	Periode	(Sn)	(P)	Koefisien variasi harga
1	April 2025	39.508,09	1.250.272,73	3,16%
2	Mei 2025	42.661,31	1.218.772,73	3,50%
3	Juni 2025	41.155,40	1.18.045,45	3,44%
Rata-Rata Triwulan II				3,37%

Penilaian ini merupakan penilaian indikator terbalik yang berarti bahwa semakin kecil pencapaian maka semakin baik, karena harga cenderung stabil (semakin kecil dari nilai target yang ditentukan)

$$= 7,8\% - 3,37\% \times 100\%$$

$$= 56,79\%$$

Triwulan II Tahun 2025, terealisasi 3,37% persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dari target kinerja sebesar 7,8%. Capaian kinerja 56,79%. **Predikat kinerja sangat baik.**



Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

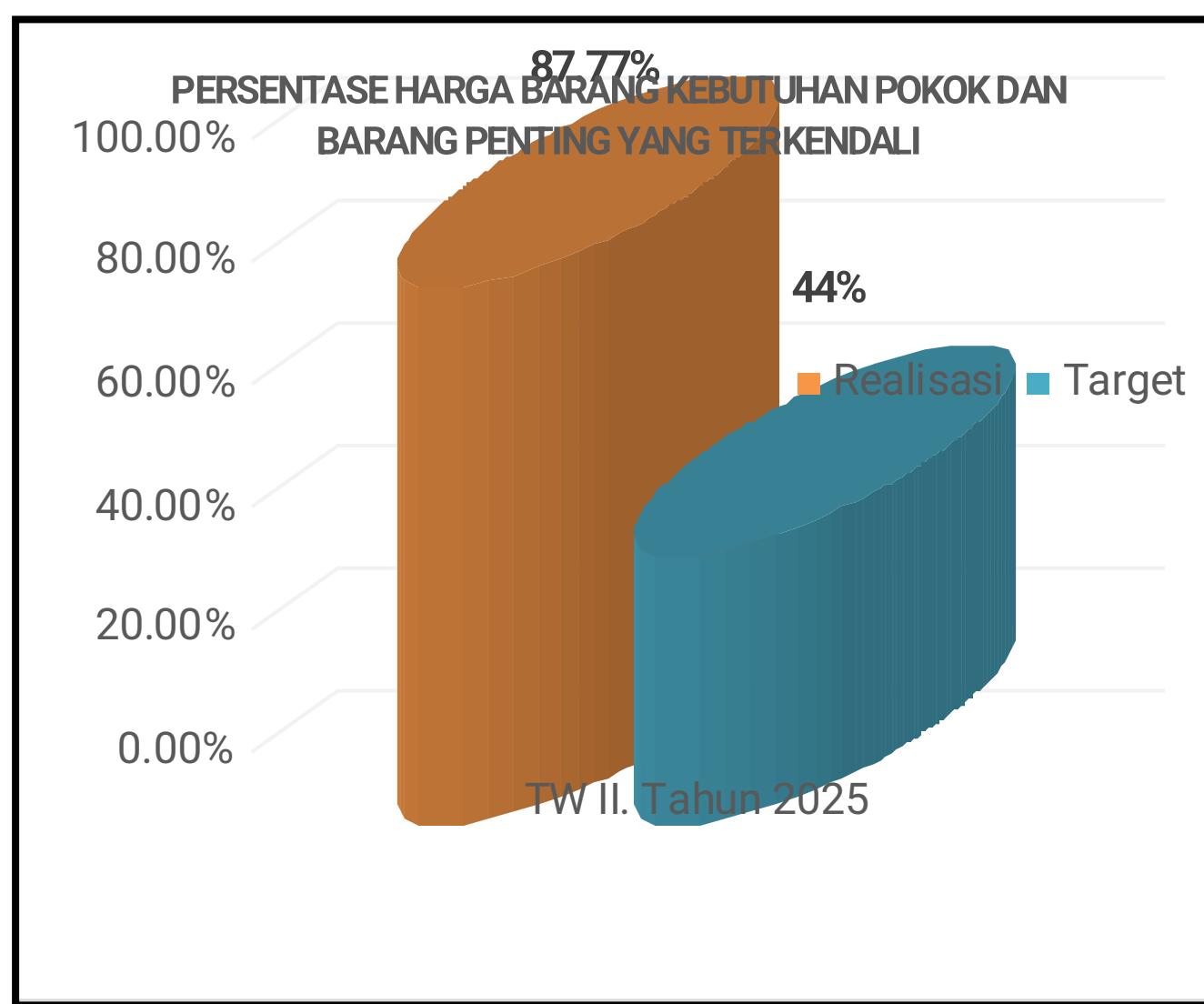
Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali yang menjadi indikator dari kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat dihitung dengan formula :

$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{\text{(Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali)}}{\text{(Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan)}} \times 100\% \right) \\
 & = (26 / 30) \times 100\% \\
 & = 87,77\%
 \end{aligned}$$

Sehingga realisasi dari kegiatan tersebut ditriwulan II tahun 2025 sebesar 87,77% dengan target yang ditetapkan sebesar 44% (capaian 199,47%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

Kegiatan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali setiap triwulannya berada diangka yang stabil (tidak berfluktuasi)

dengan 26 (Dua puluh enam) Jenis Kebutuhan pokok yang terkendali terhadap 30 (tiga puluh) kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar.

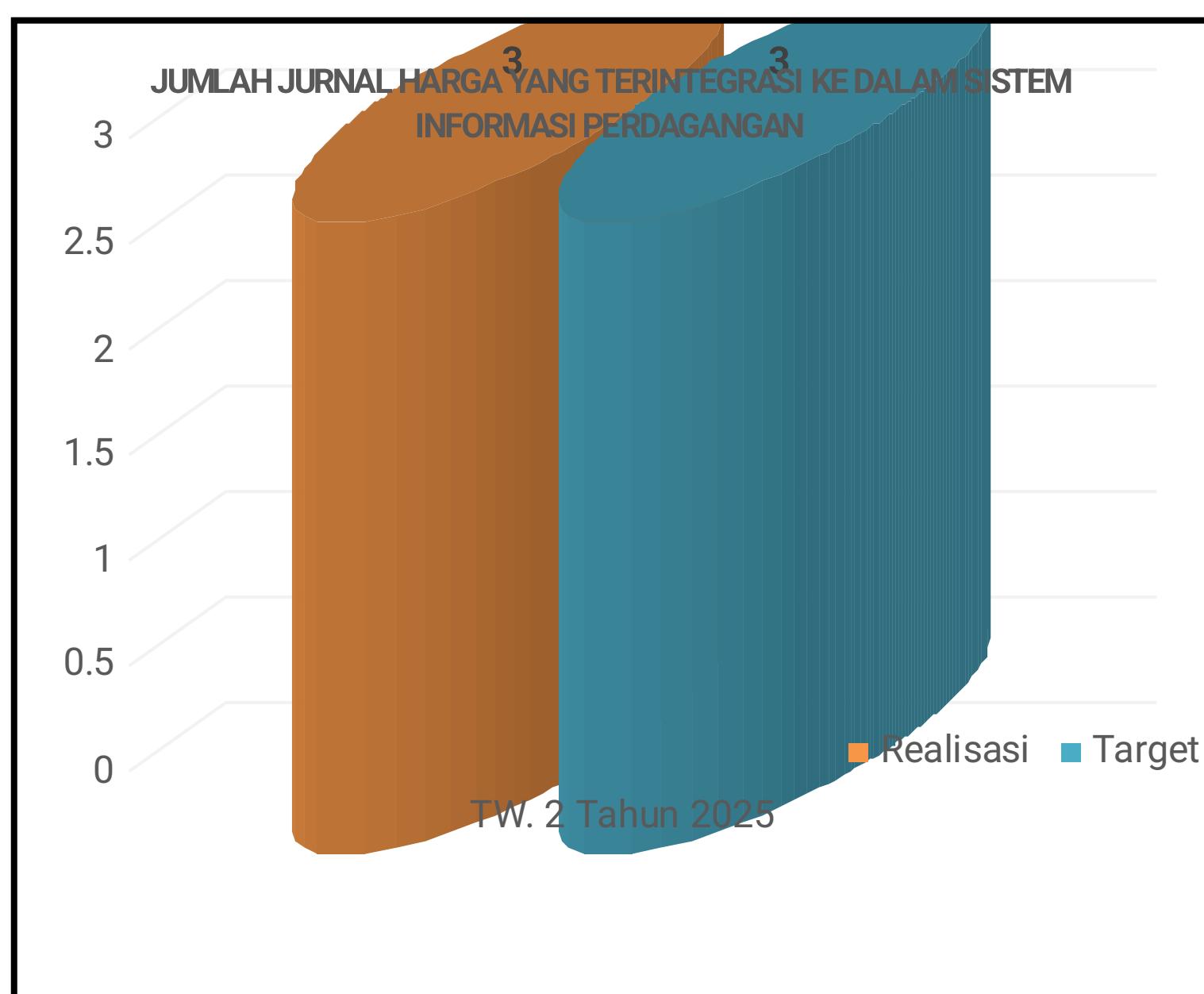


Pada jurnal kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar, terdapat 30 barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dievaluasi dan terdapat empat barang kebutuhan pokok yang mengalami fluktuasi harga seperti tomat, cabe, bawang merah, dan bawang putih selama triwulan II sedangkan 26 barang pokok lainnya masih dalam harga normal seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung lokal pipilan, tepung terigu, kacang kedelai, bawang bombay, ikan segar, garam, mie instant, kacang tanah, ketelah pohon, udang basah, tahu, pisang ambon, jeruk, sawi hijau, kentang, kangkung, kacang panjang dan ketimun

a. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sasaran Sub Kegiatan adalah tersedianya data jurnal harga dalam aplikasi sistem informasi perdagangan. Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan yang merupakan indikator dari sub

kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dapat dihitung dengan formula :



Realisasi yang diperoleh dari sub kegiatan ini ditriwulan II tahun 2025 sebanyak 3 laporan yang telah terintegrasi ke dalam aplikasi dinas perdagangan propinsi Sulawesi selatan dengan target 3 laporan (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan sembako yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada hari raya keagamaan. Metode yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah menjual sembako kepada masyarakat dengan metode pengambilannya dapat diwakili oleh aparat desa atau masyarakat mengambil secara langsung. Harga yang diberikan kepada masyarakat merupakan harga yang telah disubsidi oleh

pemerintah Kabupaten Luwu Timur. dalam sub kegiatan ini dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota pada tahun ke-n

= -

Kegiatan operasi pasar telah dilaksanakan pada bulan meret 2025 menjelang hari raya Idul Fitri. Metode yang dilakukan dalam operasi pasar adalah dengan menjual sembako kepada masyarakat. Harga paket sembako sebesar Rp. 120.000,- yang terdiri dari minyak goreng 2 liter, susu kental manis 2 kaleng, gula pasir 2 kg, mentega 1 kg, mie instan 5 bungkus dan tepung terigu 2 kg.

2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

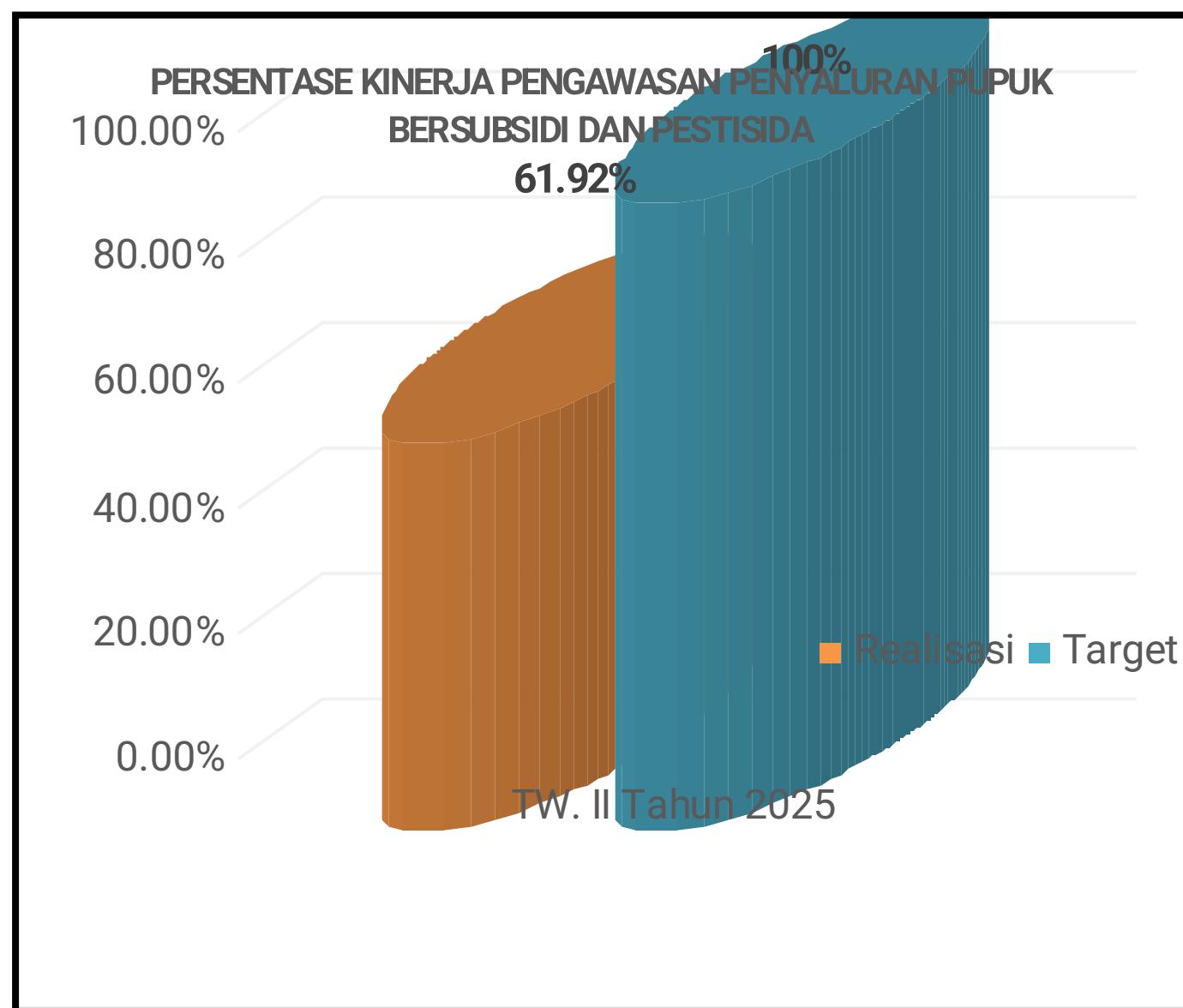
Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida agar dapat tersalur tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pupuk secara optimal. Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah pupuk bersubsidi dan pestisida yang disalurkan dibagi Jumlah pupuk bersubsidi dan pestisida yang diterima) x 100%

= $(6.312,05 \text{ ton} / 10.194,48 \text{ ton}) \times 100\%$

- 61,02%

Realisasi untuk kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota ditriwulan II tahun 2025 sebesar 61,92% dengan target 100% (capaian 61,92%) dengan predikat kinerja **Baik**.



Secara rata-rata persentase penyaluran sebesar 61,92% di tingkat pengecer pupuk bersubsidi untuk bulan April – Juni 2025. Masih terdapat stok akhir di pengecer karen menjadi kewajiban pengecer untuk menyisahkan stok pupuk setiap akhir bulan yang digunakan untuk menutupi kebutuhan petani di minggu awal bulan berikutnya.

a. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida. Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi merupakan indikator dari sub kegiatan tersebut yang dapat dihitung dengan formula :

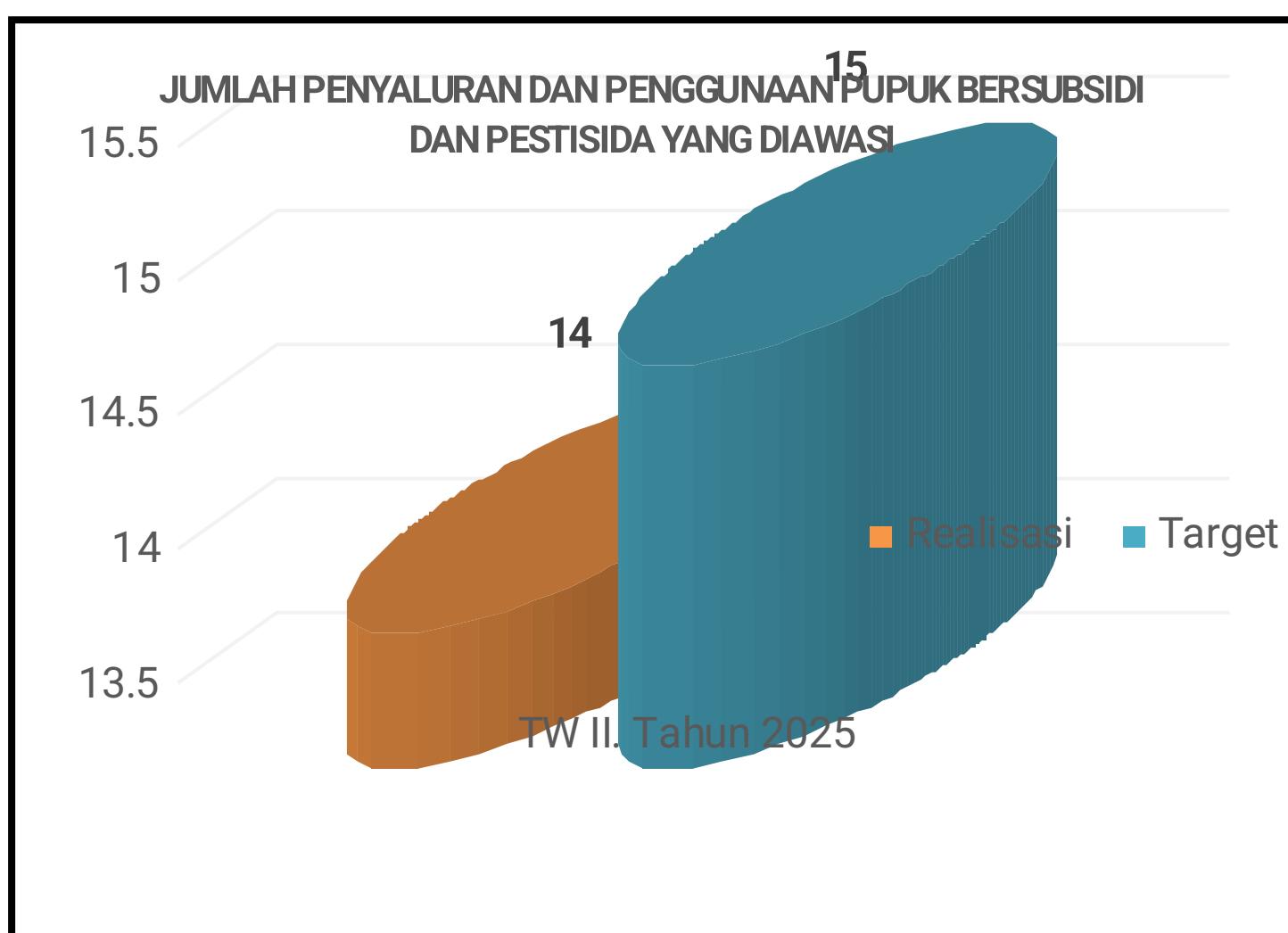
(Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi pada triwulan n tahun-n
= 14 Laporan

Pada triwulan II tahun 2025, terdapat 14 (empat belas) laporan penyaluran pupuk bersubsidi dari 5 (lima) distributor pupuk bersubsidi periode bulan

Januari – Maret 2025. Adapun 5 (lima) distributor pupuk bersubsidi pupuk subsidi adalah :

1. PT. Pupuk Indonesia Niaga
2. PT. Graha Agro Nusantara
3. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia
4. CV. Putra Bungsu Sesia
5. CV. Bunga Padi

Sehingga untuk sub kegiatan ini berdasarkan rencana aksi tahunan yang ditetapkan di triwulan II tahun 2025 diperoleh angka realisasi sebanyak 14 laporan dari target 15 laporan (capaian 93,33%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**



Dari data diatas masih ada kekurangan 1 laporan yang belum realisasi dari distributor pupuk dengan alasan masih tahap penyelesaian sehingga target kinerja pada triwulan II tahun 2025 tidak tercapai sesuai target.

4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Sasaran program “Terciptanya perlindungan konsumen dan tertib niaga” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP yang diukur dengan formula :

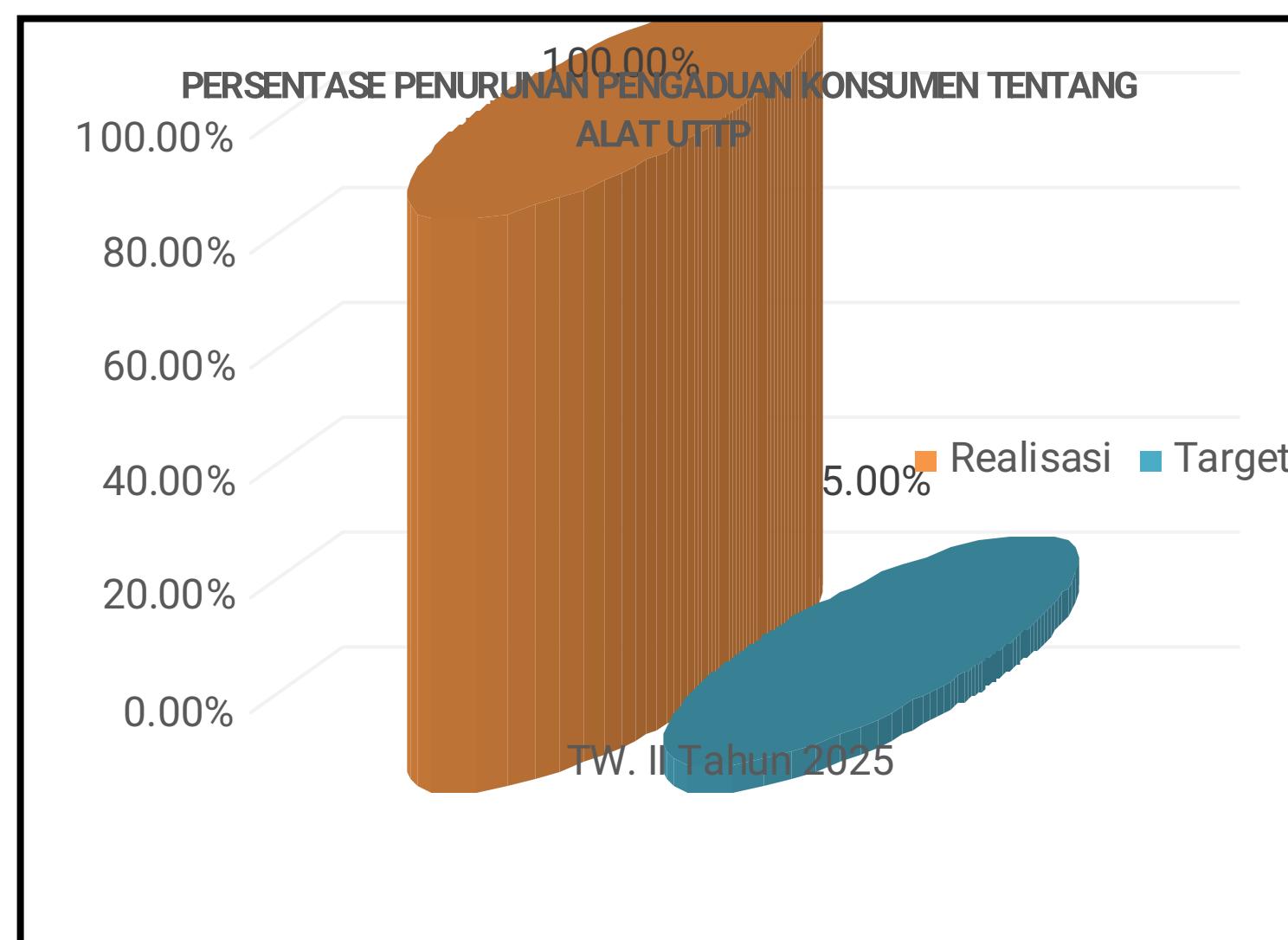
(Jumlah UTTP yang diadukan oleh konsumen yang telah ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun berjalan) dibagi Jumlah UTTP yang diawasi) x 100%
 $= 0/128 \times 100\%$
 $= 0\%$

Penilaian ini merupakan indikator terbalik yang berarti bahwa semakin kecil pencapaian maka semakin baik kinerja pelayanan tera/terulang karena pengaduan UTTP semakin turun. Sehingga untuk persentase capaiannya sebagai berikut :

$$= 5-0\% \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada triwulan II, Belum ada pengaduan dari pemilik UTTP dari target 5% (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat Memuaskan**



Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program standarisasi dan perlindungan konsumen yaitu :

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sehingga tercapai keamanan produk bagi konsumen. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi yang menjadi indikator kegiatan dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diawasi pada tahun berjalan) dibagi Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/terulang) x 100%

$$= 218/321 \times 100\%$$

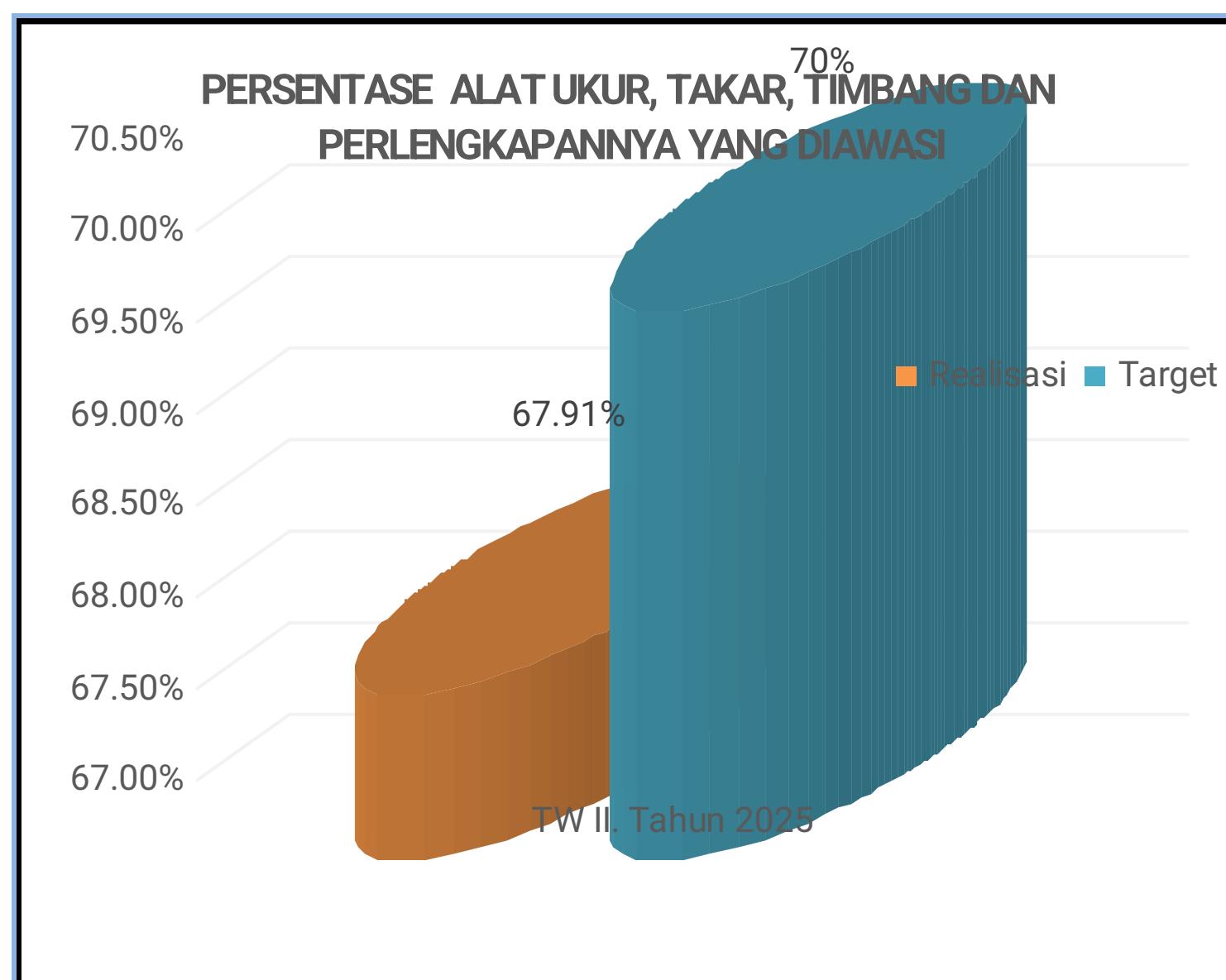
$$= 67,91\%$$

Pada kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui cap tanda tera sah pada UTTP dengan data sebagai berikut:

No	Pemilik UTTP	Kecamatan	Jumlah UTTP yang diawasi
1	Pasar Tampinna	Angkona	32
2	Pasar Wonorejo	Mangkutan	75
3	Pertashoop 7P.92909	Wotu	1
4	Pasar Malili	Malili	110
TOTAL			218

Pada tahun 2025 triwulan II, realisasi terhadap pengawasan UTTP sebesar 67,91% dari target yang ditetapkan sebesar 70% (capaian 97,01%).

Predikat kinerja sangat memuaskan



Pada kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui cap tanda terah sah pada UTTP apa masih terpasang baik UTTP yang ada dipasar maupun pengawasan metrologi legal di SPBU

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses tera/tera ulang pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Sub kegiatan ini dapat diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada triwulan n- tahun n

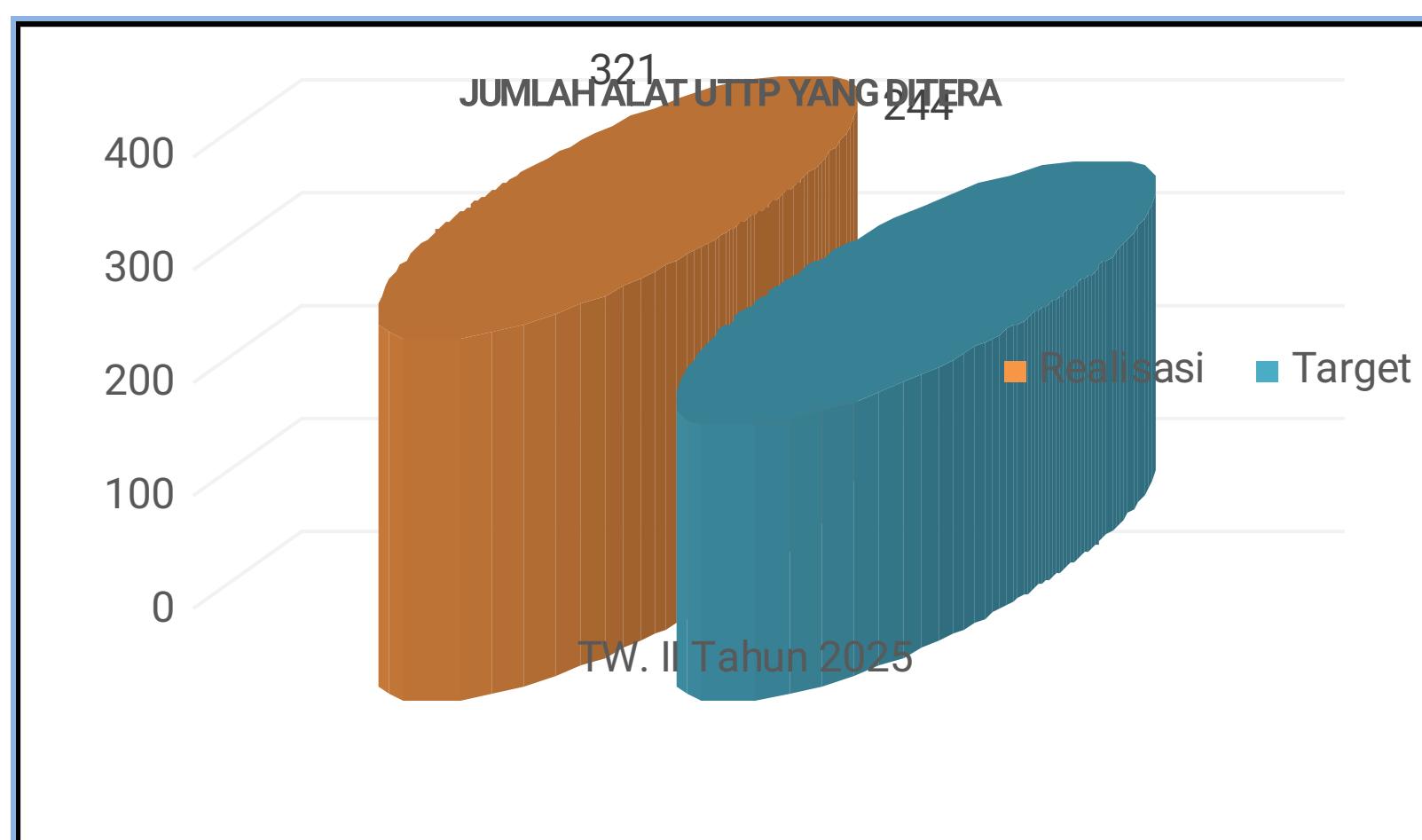
= 12 alat UTTP

Terdapat 12 (dua belas) kegiatan pelayanan tera/tera ulang pada triwulan II yang telah dilaksanakan dengan data sebagai berikut :

Pada sub kegiatan ini diperolah realisasi triwulan II tahun 2025 sebanyak 321 alat UTTP yang ditera, tera ulang dari target yang ditetapkan di triwulan II sebanyak 244 alat UTTP (capaian 131%). **Predikat kinerja sangat Memuaskan.**

No	Nama Perusahaan/ Pemilik UTTP	Kecamatan	Jumlah UTTP	Tera Ulang	%
1	SPBU Wotu	Wotu	8	8	100
2	PT. Bumi Sawit Maju	Angkona	1	1	100
3	PT. Mandiri Palmera Agrindo	Burau	1	1	100
4	Pasar Lambarese	Burau	54	54	100
5	Pasar Malili	Malili	59	59	100
6	Pasar Wonorejo	Mangkutana	41	41	100

38	7	Pasar Wawondula	Towuti	33	33	100
	8	Pasar Malindungi	Nuha	35	35	100
	9	Pasar Tampinna	Angkona	16	16	100
	10	Pasar Kalaena	Kalaena	33	33	100
	11	Pasar Wasuponda	Wasuponda	39	39	100
	12	Pertashoop	Wotu	1	1	100
		7P.92909				
TOTAL			321	321	100%	



III.3.1 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD untuk triwulan II tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis I terdiri dari 2 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 477.258.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 268.178.550,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **56,19%**. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **78,39%**, sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar **2,22%**.

**Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran
Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Stategis I
TW. II Tahun 2025**

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target TW. II 2025	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,80%	3,37%	56,79%	Rp. 236.204.300,-	59,79%	Cukup
	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	44%	87%	187,73%	Rp. 230.050.700,-	58,83%	Sangat memuaskan
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sisitem	Jumlah laporan harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan	3 laporan	3 laporan	100%	Rp. 19.500.000,-	61,71%	Sangat memuaskan

Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	6 laporan	6 laporan	100%	Rp. 210.550.700,-	58,51%	Sangat memuaskan	
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	100%	57,11%	61,92%	Rp. 6.153.600,-	88,08%	Baik
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	15 laporan	15 laporan	100%	Rp. 6.153.600,-	91,80%	Sangat memuaskan
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTPP	5%	0%	100%	Rp. 13.725.450,-	32,57%	Sangat memuaskan
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi	70%	67,91%	97,01%	Rp. 13.725.450,-	32,57%	Sangat memuaskan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	350 alat UTPP	321 alat UTPP	91,71%	Rp. 13.725.450,-	32,57%	Sangat memuaskan

III.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Dari analisis capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di triwulan II tahun 2025 berada diangka 187,73%. Keberhasilan pencapaian kinerja melebihi target yang ditetapkan sebesar 100% disebabkan beberapa komoditi kebutuhan barang pokok dan barang penting periode April-Juni 2025 Stok yang ada melebihi kebutuhan masyarakat. Komoditi tersebut yaitu Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng/Mentega, Daging Sapi, Telur Ayam, Susu, Garam Beryodium dan Pertalite. Dengan disparitas harga antar kecamatan di wilayah Kab. Luwu Timur yang dapat dipersepsikan bahwa kesenjangan daya beli masyarakat antar kecamatan di Kab. Luwu Timur semakin kecil dengan tingkat harga yang mendekati sama.
- b. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang dengan angka rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu di triwulan II sebesar 3,37% dari target 7,8%. dimana semakin rendah nilai stabilitas yang diperoleh, menunjukkan semakin stabilnya harga bahan pokok pada daerah tersebut . Sehingga dapat disimpulkan variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu cenderung stabil.
- c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja sebesar 61,92% di tingkat pengecer pupuk subsidi. Realisasi kinerja tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% disebabkan pengecer berkewajiban untuk menyisahkan stok pupuk setiap akhir bulan yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan petani di minggu awal bulan berikutnya.
- d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi kinerja sebesar 0% artinya tidak ada pengaduan masyarakat, dalam program ini merupakan penilaian indikator terbalik yang berarti bahwa semakin kecil pencapaian maka semakin baik kinerja pelayanan tera/terauulan karena pengaduan UTTP semakin turun. Keberhasilan pencapaian kinerja program disebabkan belum ada aduan dari pemilik UTTP.

1.2 Capaian Sasaran Strategis 2 :

Sasaran Strategis Kedua yaitu meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM. Variabel pengukuran dalam meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM didukung oleh 4 (empat) variabel pengukuran yaitu :

1. Indikator Kinerja I

a. Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

Pertumbuhan nilai produksi IKM sebesar 0,15% ditargetkan ditriwulan IV sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil Laporan BPS yang dirilis pada akhir tahun.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

■ Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

Tabel. 7
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	0,15%	-%	-%

Penjelasan:

Pertumbuhan nilai produksi IKM akan diukur pencapaian kinerja ditriwulan II berdasarkan rencana aksi dan laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun rumus formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

(Nilai Produksi IKM Tahun n dikurangi Nilai produksi IKM Tahun $n-1$ dibagi Nilai Produksi IKM Tahun $n-1$) $\times 100\%$

Tabel. 8
Realisasi Indikator Sasaran TW. II Tahun 2025
(dibandingkan realisasi TW. II Tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. II Tahun 2025	Realisasi TW. II Tahun 2024
-----	----------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------

1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	-	-
----	--	--------------------------------	---	---

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW II Tahun 2025 dan realisasi kinerja TW. II Tahun 2024 disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV.

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel. 9
Realisasi Indikator Sasaran TW. II Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. II Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	-	0,16%

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW II Tahun 2025 dan target akhir Renstra Tahun 2026 disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV atau akhir tahun.

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)

Tabel. 10
Realisasi Indikator Sasaran TW. II Tahun 2025
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. II Tahun 2025	Realisasi terhadap PDB
-----	----------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------

				Nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	-	-

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW II Tahun 2025 dan realisasi terhadap PDB secara nasional disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV angka PDB secara nasional dirilis diakhir tahun berkenaan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Nilai Produksi IKM :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan industri

Sasaran program yaitu tersedianya dokumen kawasan industri. Indikator yang Target yang ditetapkan untuk program perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/kota adalah 1 (satu) Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati tentang Kawasan Industri dan terealisasi 1 (satu) dokumen peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Industri Kbupaten Luwu Timur Tahun 20219- 2039, pada triwulan I sesuai rencana aksi sehingga persentase capaian kinerja program tersebut 100%. Untuk mengukur capaian kinerja dengan menggunakan formula rumus :

(Jumlah peraturan bupati tentang kawasan industri yang ditetapkan pada triwulan n- tahun n

= -

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program perencanaan dan pembangunan industri, dan dapat dihitung pada akhir tahun atau pada triwulan I .

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen revisi siteplan kawasan industri yang ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi. Sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan pencapaian kinerja kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota ditargetkan ditriwulan I tahun 2025. Untuk mengukur capaian kinerja dijabarkan dengan menggunakan rumus formula :

(Percentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri pada triwulan n- tahun n

= -

a. Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Target kegiatan ini sebanyak 40 IKM dalam sentra yang dibina dan dikembangkan, yang dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan III sesuai rencana aksi. Namun demikian dalam pelaksanaannya untuk sentra yang dibina dan dikembangkan khusus pada triwulan II belum sepenuhnya terlaksana karena SK pembentukan sentra masih menunggu pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Selatan oleh karena itu pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan III. Untuk mengukur capaian kinerja dijabarkan dengan menggunakan rumus formula :

(Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri pada triwulan n- tahun n

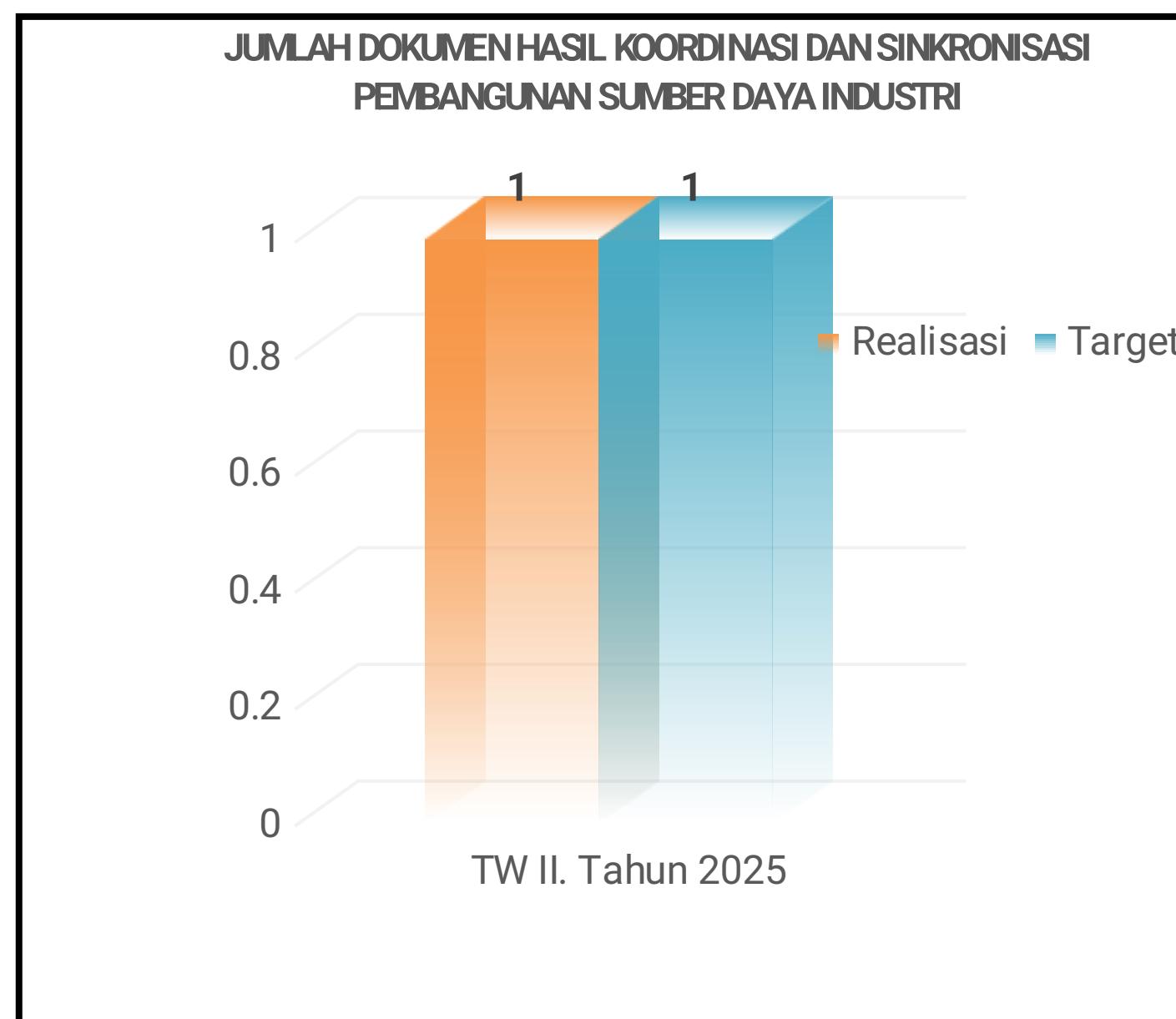
= -

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM pangan dan hadycraft. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah

Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina. Target yang ditetapkan ditriwulan II Tahun 2025, sebanyak 10 IKM pangan sehingga persentase capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 100%. Adapun yang menjadi fokus dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kepada para pelaku tersebut yaitu legalitas usaha, manajemen pengelolaan usaha, kualitas mutu produk dan pemasaran. Capaian indikator sub kegiatan diukur dengan menggunakan rumus formula :

(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada triwulan n- tahun n
= 1 Dokumen



c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM pangan melalui GMP sebanyak 20 IKM. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing process (GMP). Tahun 2025, pencapaian kinerja untuk sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan pemberdayaan industri dan

peran serta masyarakat ditargetkan ditriwulan II sesuai dengan Rencana Aksi ditetapkan namun karena ada kendala non teknis sehingga pelaksanaan kegiatan ini diundur menjadi awal triwulan III. Untuk mengukur capaian indikator sub kegiatan menggunakan formula :

(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada triwulan n-tahun n

= -

2. Program Pengelolaan Sistem informasi Industri Nasional

Sasaran program yaitu terlaksananya pengelolaan, penyajian, pelayanan dan penyebarluasan data/informasi industri yang akurat dan relevan. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri Nasional tahun 2025, Formula rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja adalah :

(Jumlah Usaha Industri Terdaftar dibagi Jumlah IKM yang terdata dikali 100% pada triwulan n

= $9/60 \times 100\%$

= 15%

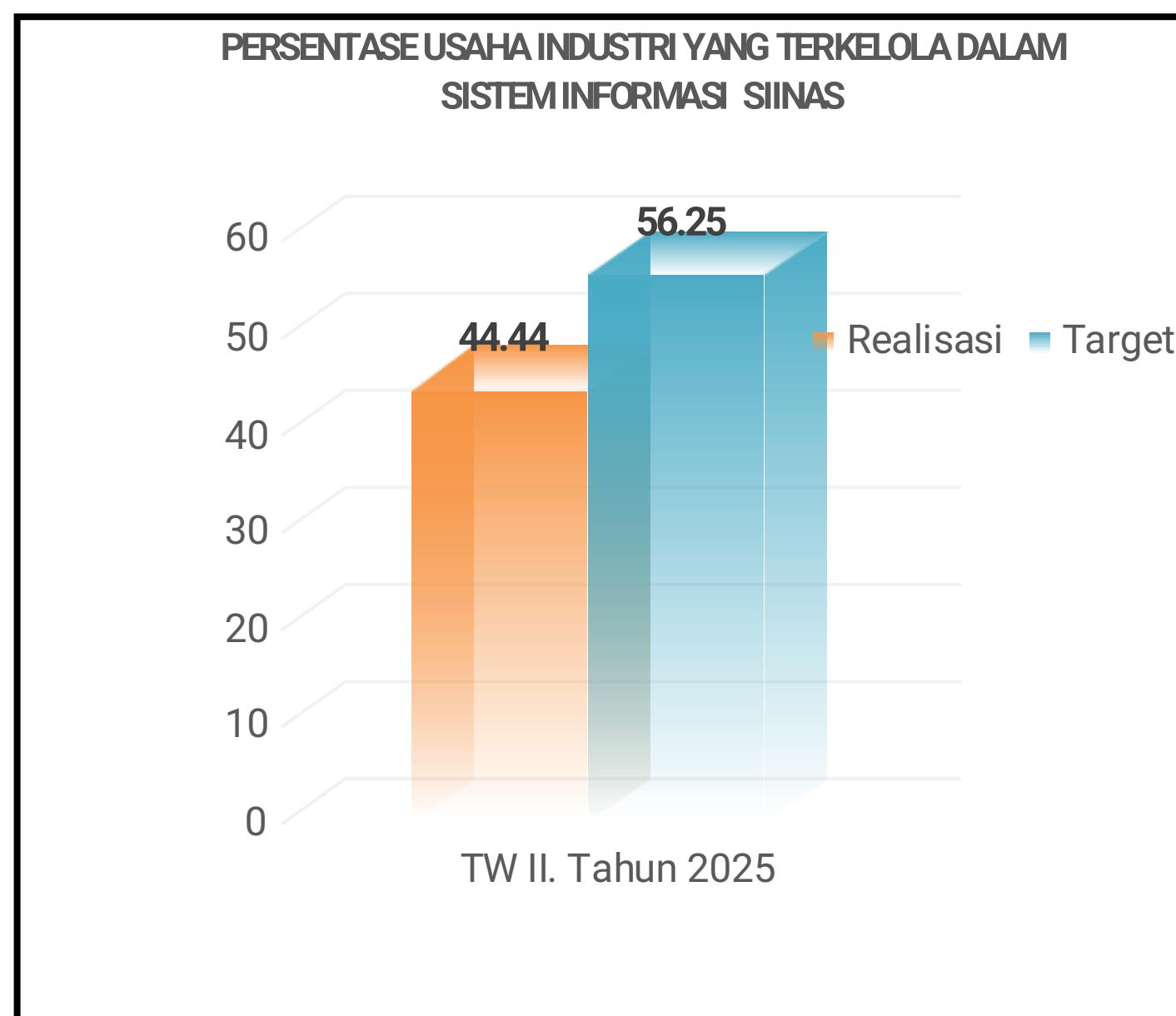
Target yang ditetapkan pada program pengolahan sistem informasi industri Nasional pada triwulan II adalah 15% pengelolaan data usaha industri kesistem informasi Nasional yang terkelolah sesuai standar dan terealisasi sebanyak 15%, sehingga persentase capaian kinerja program tersebut sebesar 100%.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional:

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Target yang ditetapkan pada kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota pada triwulan II adalah 56,25% usaha industri yang dikelola dalam sistem informasi industri Nasional dan realisasi sebanyak 44,44%. Adapun kendala belum optimalnya kinerja tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran pelaku usaha industri untuk mendaftarkan usahanya dalam sistem Informasi Industri Nasional. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

(Jumlah Usaha Industri yang telah melaporkan perkembangan kegiatan usahanya pada SII Nas dibagi Jumlah Usaha Industri yang telah terdaftar pada SII Nas x 100%
= $4 / 9 \times 100\%$
= 44,44%



a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya data industri yang valid. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah data industri yang

terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SIIINAS). Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan triwulan I. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

(Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIIINaspada triwulan n)

= -

3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Target yang ditetapkan untuk program pengendalian izin usaha industri pada triwulan II adalah 92,30%. Izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali dan terealisasi sebesar 91,43% sehingga persentase capaian kinerja program tersebut sebesar 99,06%. Realisasi kinerja program ini dapat dihitung dengan pormulasi :

(Jumlah Usaha Industri yang terkendali dibagi Jumlah Izin Usaha Industri yang difasilitasi dan diawasi dikali 100%)

= $32 / 35 \times 100\%$

= 91,43%

Adapun uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagai penunjang capaian program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini pada triwulan II adalah 59,09% fasilitasi dan pengawasan penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah dan terealisasi sebesar 58,33% atau sebesar 98,72%.

50

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sesuai target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini telah terlaksana sesuai target 20 usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi, sehingga persentase capaian kinerja untuk sub kegiatan ini sebesar 100%

(Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SII Nasional Pada triwulan n)

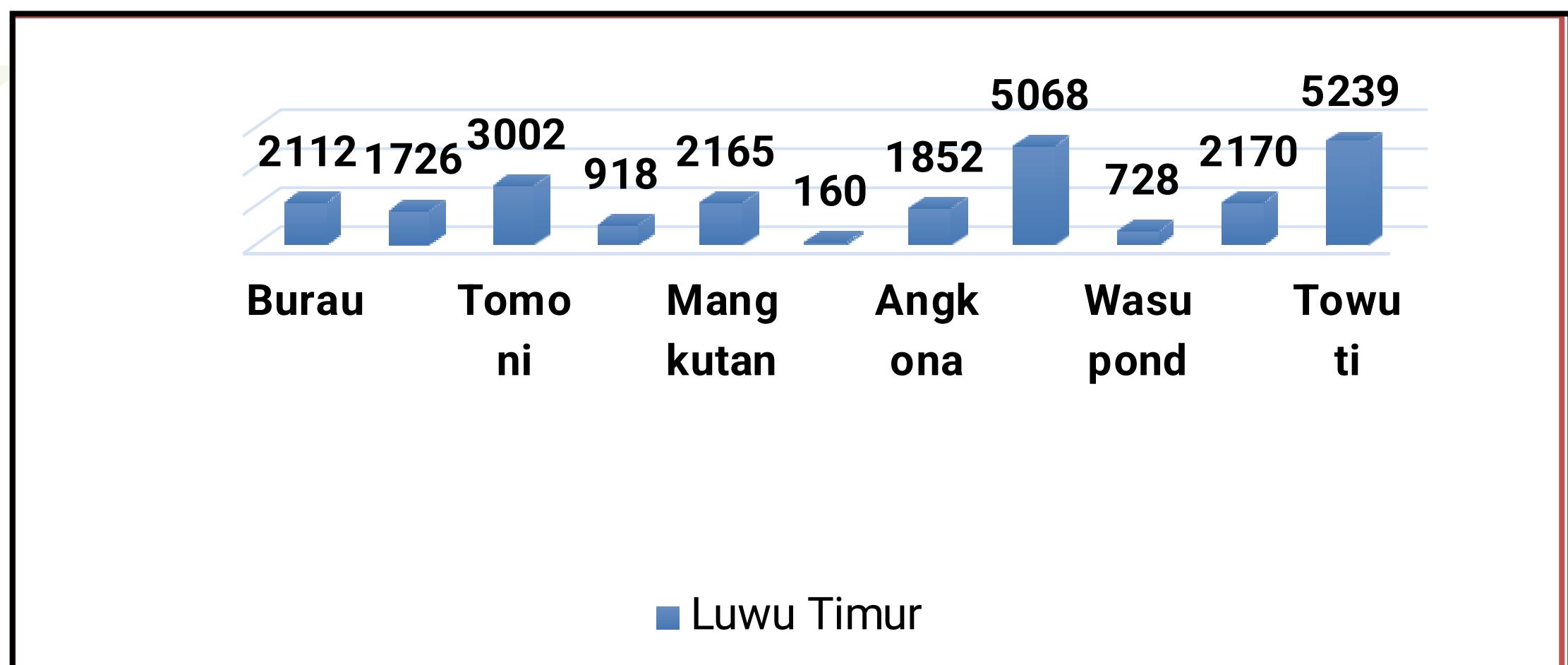
= 1 Dokumen

2. Indikator Kinerja I

a. Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang diintervensi adalah meningkatnya nilai produksi UMKM dengan indikator pertumbuhan nilai produksi UMKM. Adapun target yang ditetapkan untuk sasaran tersebut sejumlah 10,29% dan terealisasi 10,69% atau capaian 103,89%. Capaian tersebut merupakan hasil pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM yang ditunjang oleh 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan.

SEBARAN UMKM di KAB. Luwu Timur



(sumber data :Data Bidang UMKM Tahun 2025)

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

- **Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM**
- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 11
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	10,29%	10,69%	103,89%

Penjelasan:

Pencapaian positif juga dicapai oleh indikator kinerja utama ke-2 bidang UMKM kaitannya dengan pertumbuhan nilai produksi UMKM. Tahun 2025 berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan ditriwulan II, target untuk pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 10,29% dengan realisasi 10,93%. Nilai capaian kinerja sebesar 106,22 %. Realisasi pertumbuhan nilai produksi UMKM tersebut diperoleh dari formula:

Rata-rata nilai tahun ini – Rata-rata nilai produksi tahun lalu dibagi Rata-rata nilai produksi tahun lalu dikali 100%

$$= 365.425.000 - 329.425.000 / 329.425.000 \times 100\%$$

$$= 10,93 \%$$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

Tabel. 12
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan realisasi Triwulan II Tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	10,93%	10,86%

Penjelasan:

Bila dibanding dengan capaian tahun lalu dalam periode yang sama terjadi kenaikan rata-rata nilai produksi atau mengalami pertumbuhan dengan tren positif yakni dari Rp. 327.385.000,- menjadi Rp. 362.385.000 atau tumbuh sebesar 10,93%. Pencapaian tersebut akan ditunjang oleh 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub. Kegiatan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 13
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
-----	----------------------	-------------------	----------------------------------	---------------------------------

1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	10,93%	10,29%
----	--	---------------------------------	--------	--------

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 dengan pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 10,29%, maka realisasi yang diperoleh ditriwulan II tahun 2025 sudah melampaui target diakhir periode.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional (terhadap PDB)**

Tabel. 14
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan target secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Nasional terhadap PDB
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	10,69%	-

Penjelasan:

Secara nasional Pertumbuhan nilai produksi UMKM terhadap PBD belum dirilis secara nasional biasanya diakhir tahun.

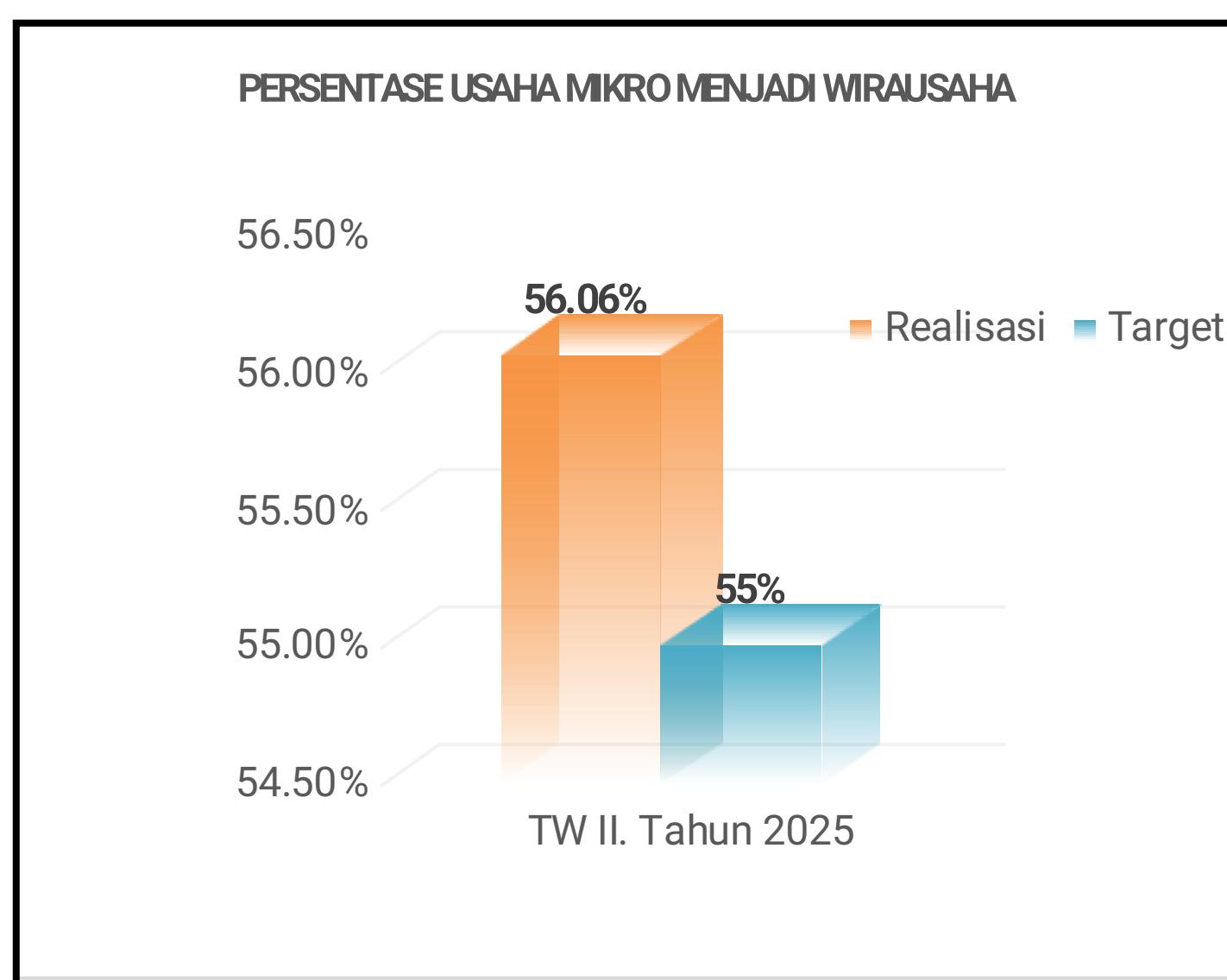
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Sasaran program yaitu meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan indikator kinerja “ persentase usaha mikro menjadi wirausaha. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

(Jumlah wirausaha baru (WUB) dibagi Jumlah UMKM yang diinput ke ODS) x 100%
 $= 37 \text{ WUB} / 66 \text{ UMKM} \times 100\%$
 $= 56,06\%$

Target yang ditetapkan untuk Program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro adalah sebesar 55% Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dan realisasi 56,06%, dengan demikian capaian kinerja program pada triwulan II tahun 2025 sebesar 101,93%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



1) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya wirausaha baru berskala mikro dengan indikator kinerja “ Jumlah wirausaha baru berskala mikro. Untuk mengukur capaian indikator kinerja pada kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan formula :

(Jumlah wirausaha baru diinput ke ODS dibagi Target wirausaha baru dikali 100%
= 37 WUB/34WUB x 100%
= 108,82%

Realisasi indikator kinerja pada triwulan II tahun 2025 untuk kegiatan tersebut adalah 37 terhadap target 34 WUB (Capaian 108,82%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data usaha mikro yang valid dengan indikator kinerja “ jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS). Untuk mengukur capaian indikator kinerja menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang diinput ke ODS pada triwulan (n) tahun-n
= 66 usaha mikro

Berdasarkan penetapan target kinerja triwulan II tahun 2025 untuk sub kegiatan tersebut diperoleh realisasi sebanyak 66 usaha mikro dari target 65 usaha mikro dengan capaian 101,54%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan yaitu terfasilitasinya usaha mikro untuk kemudahan perizinan dengan indikator kinerja jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan pada triwulan I tahun-n)
= 40 usaha mikro

Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro terealisasi pada triwulan II tahun 2025 sebanyak 40 usaha mikro dari target 40 usaha mikro (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**

c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil dalam pengembangan SDM. Untuk mengukur indikator dari sub kegiatan yang dimaksud yaitu dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM pada triwulan (n) tahun-n)
= 40 UMKM

Target kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro adalah 40 UMKM, Usaha Mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM dan terealisasi 40 UMKM yang mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan atau capaian kinerja 100%.

2. Program Pengembangan UMKM

Sasaran program yaitu meningkatnya usaha mikro yang naik kelas. Program tersebut dilengkapi dengan indikator “ Rasio pertumbuhan skala usaha mikro. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

(Persentase peningkatan skala usaha mikro Tahun ini dikurangi persentase peningkatan skala usaha mikro Tahun lalu dibagi persentase peningkatan skala usaha mikro tahun lalu x 100%
= -

Target kinerja yang ditetapkan pada program Pengembangan UMKM adalah 6,36%, Rasio Pertumbuhan skala usaha mikro dan akan terealisasi pada akhir tahun atau triwulan IV tahun 2025, mengingat kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 dan untuk perhitungan capaian kinerja program tersebut berdasarkan perbandingan tahun ini dan tahun lalu.

1) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas dengan indikator kinerja “ persentase peningkatan skala usaha mikro” . Untuk mengukur capaian indikator kegiatan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha dibagi Jumlah UMKM yang terdata pada Online Data System x 100%

= -

Sesuai dengan rencana aksi tahunan target kinerja untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil ditargetkan ditriwulan IV.

a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Sasaran dari sub kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil untuk standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Indikator dari kegiatan tersebut adalah jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Menurut UU No.33 Tahun 2014 khususnya prosedur fasilitasi sistem jaminan halal, dimana semua permohonan pendaftaran Sistem Jaminan Halal harus melalui aplikasi SiHalal BPJPH Kementerian Agama untuk penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai syarat audit pihak LPPO MUI. Untuk mengukur capaian indikator, dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha

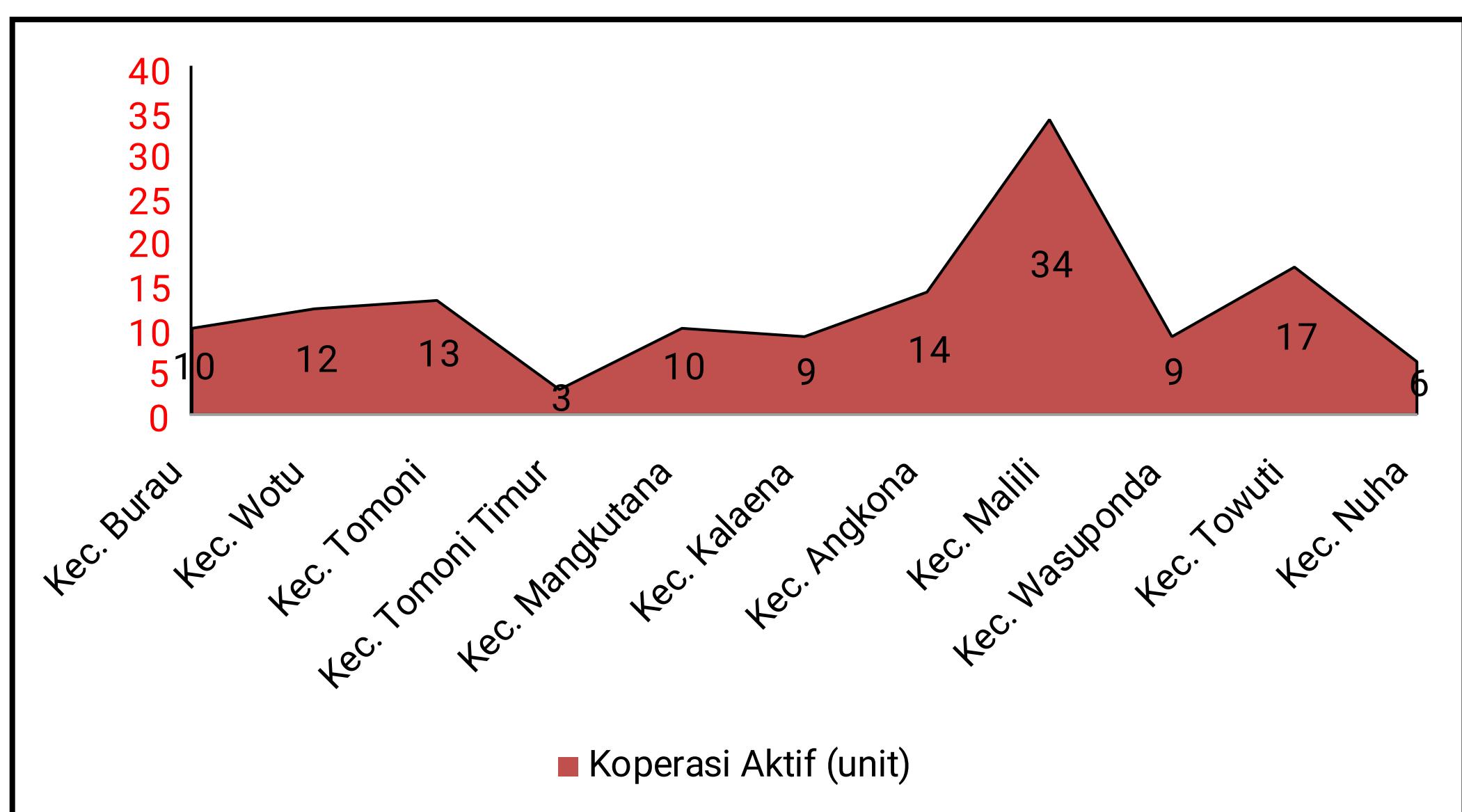
= -

Sesuai dengan rencana aksi Target pencapaian kinerja Realisasi kinerja pada sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi tahun 2025 ditargetkan ditriwulan III.

3. Indikator Kinerja I

a. Persentase Koperasi Aktif

Triwulan II Tahun 2025, ditargetkan persentase koperasi aktif sebesar 80% dengan realisasi sebesar 79,19% dengan capaian kinerja 98,99%. Jumlah koperasi aktif triwulan II tahun 2025 sebanyak 137 unit dari total keseluruhan koperasi sebanyak 173 unit koperasi.



Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

- **Persentase Koperasi Aktif**
- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 15
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan	Persentase Koperasi Aktif	80,00%	79,19%	98,99%

	nilai produksi IKM dan UMKM				
--	-----------------------------	--	--	--	--

Penjelasan:

Pencapaian yang positif untuk persentase koperasi aktif dengan realisasi sebesar 79,19% dari target sebesar 80,00% dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,99%) Realisasi persentase koperasi aktif tersebut diperoleh dengan menggunakan formula:

$$\begin{aligned}
 & (\text{Jumlah koperasi aktif pada triwulan n- tahun -n dibagi jumlah keseluruhan koperasi}) \times 100\% \\
 & = 137 \text{ koperasi dibagi } 173 \text{ koperasi } \times 100\% \\
 & = 79,19\%
 \end{aligned}$$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2025 dengan Tahun TW. I 2024**

Tabel. 16
Realisasi Indikator Sasaran II TW. II Tahun 2025
(dibandingkan realisasi TW. I Tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. 2 Tahun 2025	Realisasi TW.2 Tahun 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	79,19%	79,19%

Penjelasan:

Triwulan II Tahun 2025, persentase koperasi aktif sebesar 79,19% tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 .

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 17
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2025

(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW II. Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase koperasi aktif	80,00%	80,00%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase koperasi aktif sebesar 80,00%, maka realisasi yang diperoleh di Triwulan II Tahun 2025 masih perlu ditingkatkan ditahun berikutnya sehingga diakhir periode Renstra target yang ditetapkan dapat tercapai.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional

Tabel. 18
Realisasi Indikator Sasaran TW. II Tahun 2025
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. II Tahun 2025	Realisasi secara nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase Koperasi aktif	79,19%	97,13%

(sumber data : Laporan ODS KemenkopUKM periode s/d Juni 2025)

Penjelasan:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Persentase Koperasi Aktif :

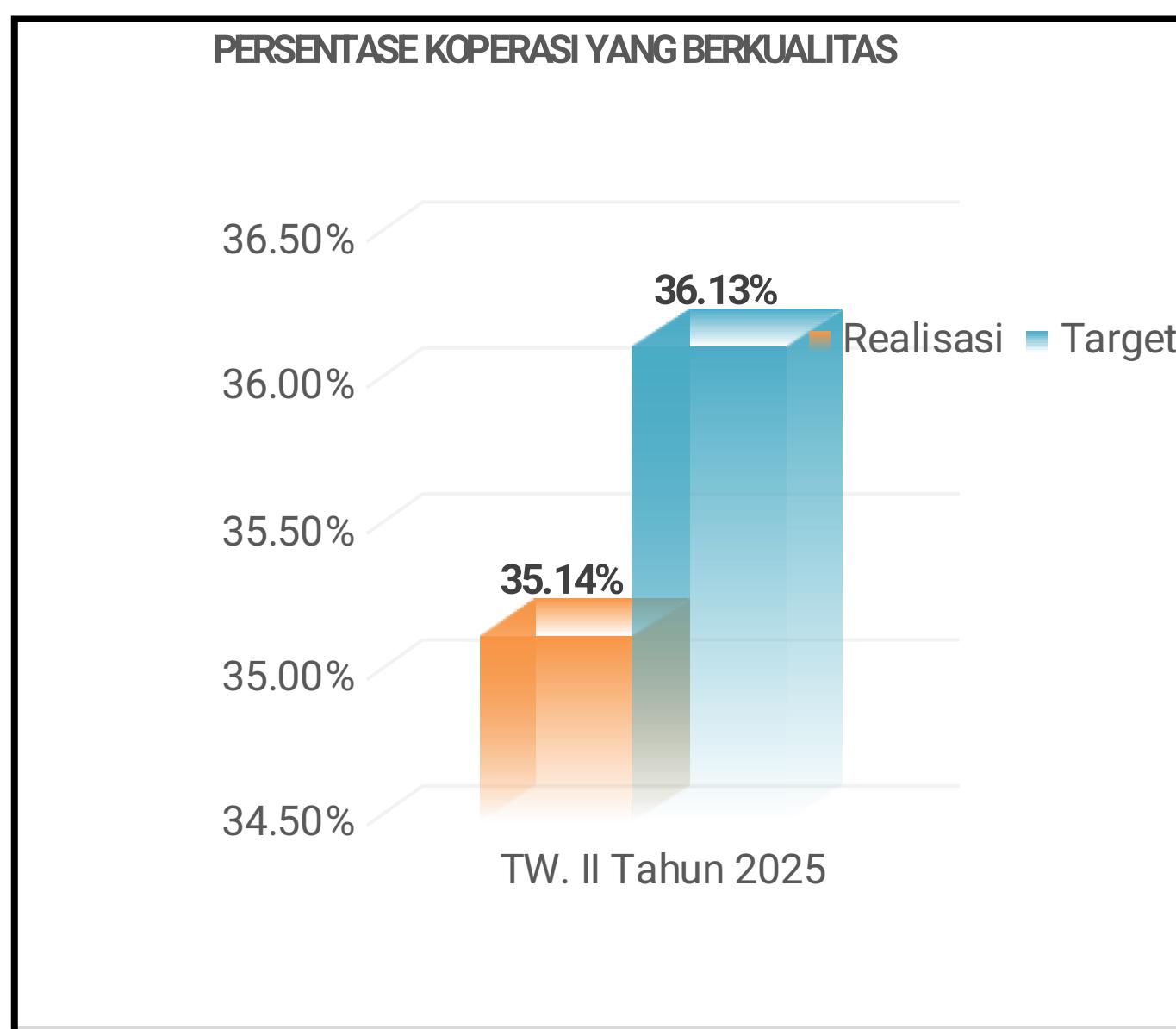
1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

61

Sasaran program “ Meningkatnya Koperasi yang berkualitas” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang berkualitas yang diukur dengan formula:

(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset pada triwulan (n) tahun berjalan) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100%
 $= 65/185 \times 100\%$
 $= 35,14\%$

Realisasi indikator sasaran program ini untuk Triwulan II Tahun 2025 sebesar 35,14% dari target 36,13% (persen capaian 97,26%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan adalah untuk meningkatnya jumlah koperasi aktif. Sehingga Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi indikator kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah koperasi yang dilakukan oleh pengawasan, kekuatan, kesehatan dan kemandirian pada triwulan (n) tahun berjalan) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100%
= 43/185x 100%
= 23,24%

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk Triwulan II Tahun 2025 sebesar 23,24% dari target 22,16% (persen capaian 104,87%). **Predikat kinerja Sangat Memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya pengawasan dan pembinaan koperasi. Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan dengan formula :

(Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi pada triwulan (n) tahun berjalan
= 43 koperasi

Realisasi tehadap target untuk sub kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 43 koperasi dari target 41 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 104,88%.

Predikat kinerja sangat memuaskan.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Sasaran program “ Meningkatnya kesehatan koperasi KSP/USP” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi sehat yang diukur dengan formula:

(Jumlah koperasi sehat pada tahun berjalan) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) pada triwulan (n) tahun berjalan) x 100%

= -

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja untuk program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi ditetapkan di Triwulan III.

1) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari kegiatan adalah meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya merupakan indikator dari kegiatan tersebut yang dapat diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya pada tahun berjalan dibagi jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) pada tahun berjalan) x 100%

= -

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja untuk kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota ditetapkan di Triwulan III.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya bimtek penilaian kesehatan koperasi KSP/USP, dengan indikator jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP. Pencapaian sub kegiatan dijabarkan melalui formula dibawah:

(Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP pada tahun n-)
= -

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja untuk sub kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota ditetapkan di Triwulan III.

3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sasaran program adalah meningkatnya koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi. Formula yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja yaitu:

(Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas di bagi jumlah keseluruhan koperasi x 100%
= $10 / 142 \times 100\%$
= 7,04%

Target yang ditetapkan untuk program pemberdayaan dan perlindungan koperasi pada triwulan II sebesar 6,75% koperasi yang berkualitas dan realisasi sebesar 7,04% sehingga capaian kinerja bidang koperasi melalui program ini untuk triwulan II sebesar 104,30% dengan **predikat kinerja sangat memuaskan**.

1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan “ Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi” dilengkapi satu indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan

produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha yang diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas dibagi jumlah koperasi aktif) x 100%)

$$= 10 / 142 \times 100\%$$

$$= 7,04\%$$

Target kinerja untuk kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota ditetapkan ditriwulan II adalah sebesar 6,75% dan realisasi sebesar 7,04%, capaian sebesar 104,30% . dengan **predikat kinerja Sangat memuaskan**.

a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan yaitu meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator sub kegiatan tersebut adalah jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi kewenangan kabupaten/kota.

Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas)
= 10 Koperasi

Target capaian kinerja pada sub kegiatan fasilitasi pemberdayaan, peningkatan produktifitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha kewenangan kab/kota sebanyak 10 koperasi dari target 10 koperasi atau realisasi sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini direncakan pelaksanaannya pada Triwulan IV sesuai Anggaran kas. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam pada tahun dilaporkan dibagi jumlah KSP/USP dikali 100%)
= $11 / 69 \times 100\%$
= 15,94%

Target yang ditetapkan untuk program pelayanan izin usaha simpan pinjam pada triwulan II adalah sebesar 14,72% dan realisasi sebesar 15,94% sehingga capaian kinerja bidang koperasi melalui program ini untuk triwulan II sebesar 108,29%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1). Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah koperasi yang difasilitasi izin usaha simpan pinjam. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang diterbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam di bagi jumlah KSP/USP di kali 100%)
= $10 / 69 \times 100\%$
= 14,49%

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Kabupaten/Kota

Rencana pelaksanaan kegiatan di Triwulan II. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam pada triwulan (n) tahun berjalan)
= 10 Koperasi

Capaian target ditriwulan II pada sub kegiatan ini dapat bahwa terget 10 koperasi dengan capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

4. Indikator Kinerja I

a. Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan

Triwulan II Tahun 2025, ditargetkan pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 12,50% dengan realisasi sebesar -10,62% dan capaian kinerja sebesar -84,96%. Pertumbuhan sub sektor perdagangan dipengaruhi oleh omzet pedagang dan nilai ekspor. Omzet pedagang Triwulan II Tahun 2025 senilai Rp. 159.318.211.500,- meningkat dibandingkan omzet pedagang Tahun 2024 pada periode yang sama senilai Rp. 146.154.780.000,- dan nilai ekspor mengalami penurunan di Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 2.264.349.037.760,- dibandingkan Tahun 2024 dengan periode yang sama sebesar Rp. 2.565.422.996.400,- hal ini dipengaruhi karena harga satuan rat-rata nikel dalam US\$ tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024.

■ **Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan**

- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 19
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	12,50%	-10,62%	-84,96%

Penjelasan:

Pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 2 menunjukkan pencapaian negatif dengan angka pertumbuhan sebesar -10,62%. Pertumbuhan sub sektor perdagangan dengan angka yang signifikan dipengaruhi oleh penurunan harga nikel dipasar dunia.

Realisasi perumbuhan seb sektor perdagangan tersebut diperoleh dari formula :

(Nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun-n di kurangi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun (n-1) dibagi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun (n-1)) x 100%

$$= (\text{Ekspor Triwulan II Tahun 2025} + \text{Omset Pedagang Triwulan II Tahun 2025}) - (\text{ekspor Triwulan II Tahun 2024} + \text{Omset Pedagang Triwulan II Tahun 2024}) \text{ dibagi } (\text{Eksport Triwulan II Tahun 2024} + \text{Omset Pedagang Triwulan II Tahun 2024}) \times 100\%$$

$$= (2.264.349.037.760 + 159.318.211.500) - (2.565.422.996.400 + 146.154.780.000) \text{ dibagi } (2.565.422.996.400 + 146.154.700.000) \times 100\%$$

$$= -10,62\%$$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2024**

Tabel. 20

**Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan target)**

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. II Tahun 2025	Realisasi TW. II Tahun 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	-10,62%	-9,89%

Penjelasan:

Realisasi pertumbuhan sub sektor perdagangan Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 pada periode yang sama dengan penurunan -0,73%.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel. 21

**Realisasi Indikator Sasaran TW. II Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)**

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	-10,62%	12,5%

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Triwulan II Tahun 2025 sebesar -10,62% terhadap target akhir renstra sebesar 12,5% maka secara umum mengalami penurunan karena masih jauh dari target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan.

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional

Tabel. 22
Realisasi Indikator Sasaran TW. II Tahun 2025
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. II Tahun 2025	Realisasi Secara Nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	-10,62%	5,03%

(sumber data laporan Triwulan II 2025 Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional:

Penjelasan:

Laporan Triwulan II 2025 Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional pertumbuhan sektor perdagangan belum mendapatkan data . Dengan periode yang sama untuk Kabupaten Luwu Timur sub sektor perdagangan bertumbuh sebesar -10,62%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

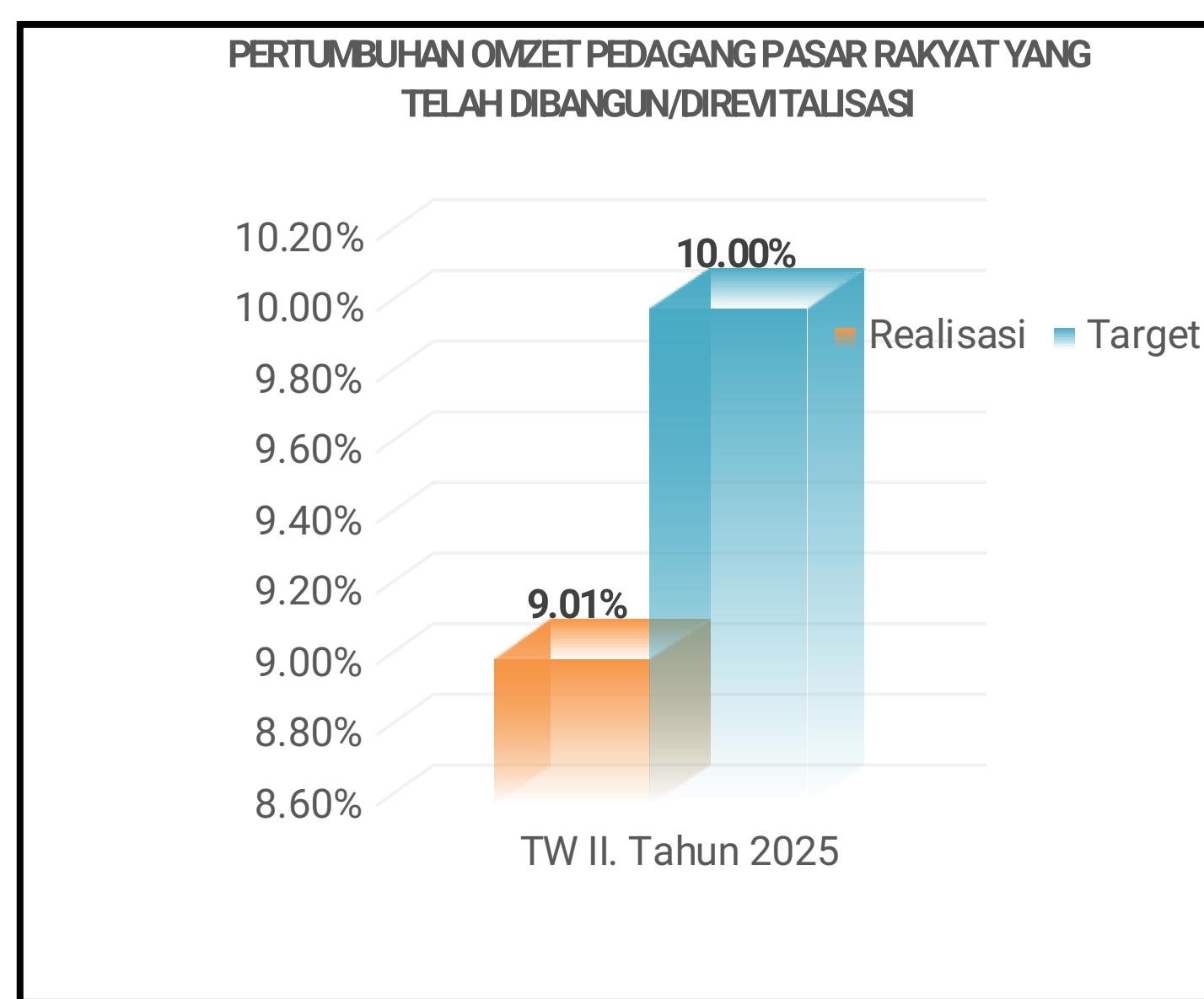
Sasaran program peningkatan sarana distribusi perdagangan adalah meningkatnya omzet pedagang dengan indikator program pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

(Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun-n dikurangi Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun (n-1) dibagi Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun (n-1)) x 100%

= (Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW. II Tahun 2025 – Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW II Tahun 2024) / Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW. II Tahun 2024 x 100%

= Rp 159.318.211.500 – Rp.146.154.780.000 / Rp 146.154.780.000 x 100%

Realisasi berdasarkan indikator pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi Triwulan II Tahun 2025 sebesar 9,01% dari target sebesar 10% (capaian 90,10%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**



1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu meningkatnya pengelolaan pasar dan sarana prasarana distribusi perdagangan dengan indikator jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi adalah:

1. Lanjutan Pembuatan Kanopi Pasar Malili Kec. Malili
2. Pembangunan Pasar Sumber Makmur Kec. Kalaena
3. Pembangunan Pasar Tomoni Tahap II Kelurahan Tomoni
4. Pembangunan Pasar Wonorejo Kec. Mangkutana
5. Rehabilitasi Pasar Wasuponda Kec. Wasuponda

6. Lanjutan Penataan Halaman Pasar Wana Sari Kec. Angkona
7. Pembangunan Pasar Malindungi Tahap I Kec. Nuha

Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang
termanfaatkan

= -

Untuk tareget pemanfaatan 7 (tujuh) pasar tersebut di triwulan IV sehingga untuk pekerjaan fisik di triwulan II belum dilaksanakan. Pada triwulan ini masih dilakukan persiapan tender pekerjaan

a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dengan indikator jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan
prasarananya pada tahun-n

= -

Berdasarkan penetapan target kinerja untuk indikator jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya ditetapkan tahun 2025 sebanyak 7 pasar yang dibangun/direvitalisasi dan ditargetkan ditriwulan IV.

**2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya**

Sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2025, pencapaian target kinerja

ditargetkan ditriwulan IV. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

Jumlah pengelola pasar yang di-UPTD yang dibina dibagi Jumlah Pasar yang di UPTD yang dibina pada tahun-n x 100%

= -

a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2025, pencapaian target kinerja ditetapkan ditriwulan IV. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina pada tahun-n

2. Program Pengembangan Ekspor

Sasaran program adalah meningkatnya nilai ekspor perdagangan dengan indikator kinerja “ persentase peningkatan nilai ekspor” . Untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan menggunakan rumus formula :

Nilai ekspor triwulan (n) tahun – n dikurangi Nilai Ekspor triwulan (n) tahun (n – 1) dibagi Nilai ekspor triwulan (n) tahun (n – 1) x 100%

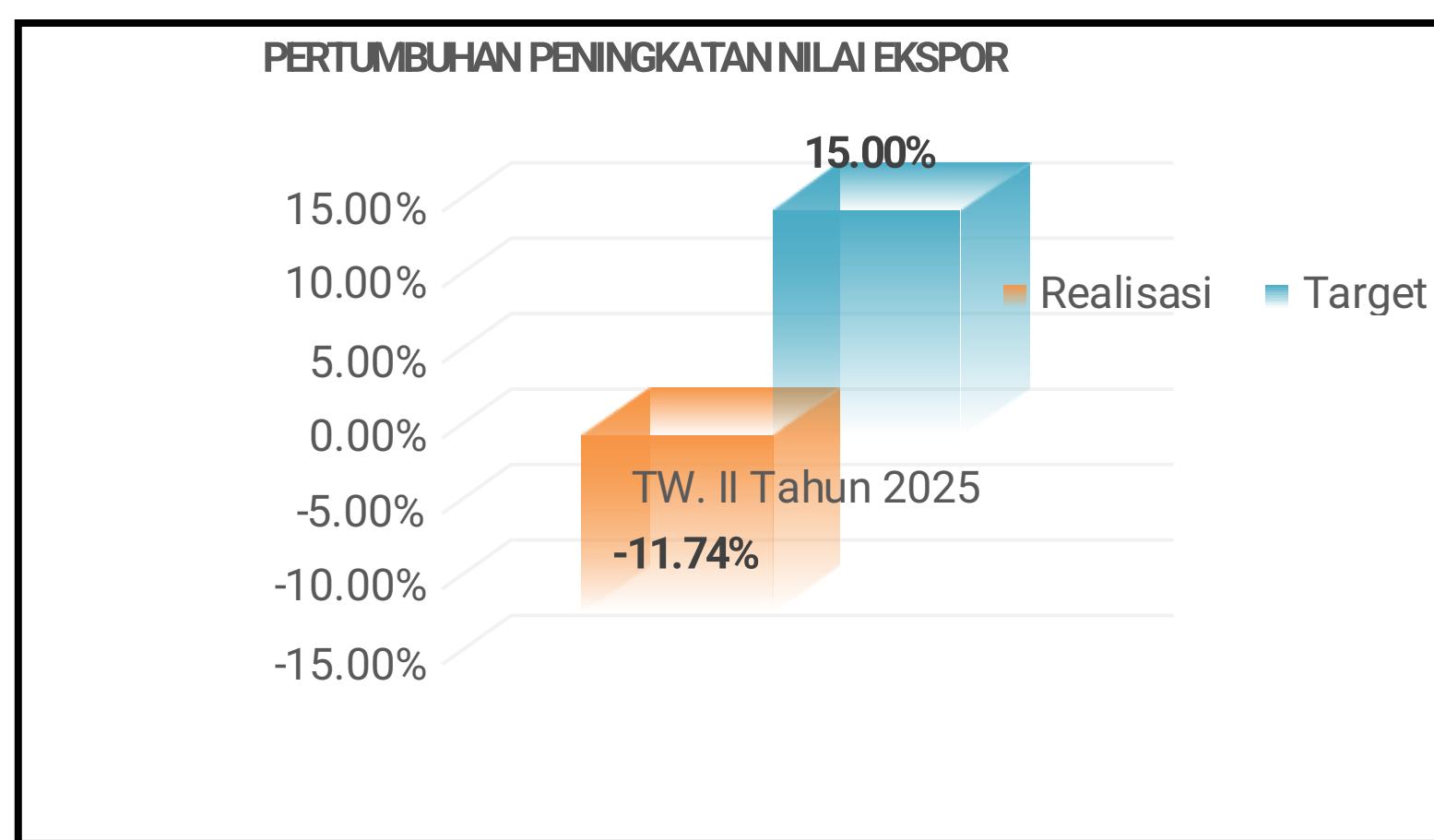
= Nilai ekspor triwulan II tahun 2025 – Nilai ekspor triwulan II tahun 2024 / Nilai ekspor triwulan II tahun 2024 x 100%

= Rp. 2.264.349.037.760 – Rp. 2.565.422.996.400 /
Rp. 2.565.422.996.400 x 100%

Dari hasil formula diatas, berarti bahwa nilai ekspor triwulan II (bulan april – Mei 2025) mengalami penurunan sebanyak 11,74% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Data yang ada saat ini hanya bulan april – mei 2025 dan bulan juni belum tersedia. Penurunan terjadi karena dipengaruhi oleh rata-rata harga nikel (dala US\$) yang lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2024.

Tabel. 23
Realisasi Indikator Sasaran TW. II Tahun 2025

No	Program	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian
1	Pengembangan Ekspor	15%	-11,74	-78,27



1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Eksport Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan adalah terfasilitasinya produk unggulan dalam promosi dagang dengan indikator kegiatan “ Persentase prosuk yang memperoleh fasilitas promosi dagang. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang pada tahun berjalan dibagi jumlah produk unggulan x 100%

Target kegiatan ini sebesar 40% namun belum terlaksana karena pelaksanaan promosi dagang melalui kegiatan pameran dagang lokal yang sebelumnya direncanakan akan diikuti pada triwulan II belum ada. Kegiatan pameran dagang lokal ini mengikuti jadwal kegiatan dari provinsi namun selama periode triwulan II belum ada kegiatan pameran yang digunakan untuk memperkenalkan produk ekspor unggulan.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor tentang peningkatan SDM, daya saing dan promosi dengan indikator jumlah produk unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi

= -

Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi target ditetapkan ditriwulan III.

b. Sub Kegiatan Pemeran Dagang Lokal

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang bagi produk UMKM dan produk ekspor unggulan. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah:

Jumlah pelaku yang difasilitasi dalam pemeran dagang lokal

= -

Adapun target pelaksanaan sub kegiatan ini pada triwulan II sebanyak 5 (lima) pelaku usaha. Namun target ini tidak terealisasi karena belum adanya kegiatan pameran lokal yang diadakan oleh penyelenggara ekspor baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

c. Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan dengan indikator " jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan.

Adapun target pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan IV atau mengikuti jadwal pelaksanaan Trade Expo Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan RI. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pelaku yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan

= -

d. Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang bagi produk ekspor unggulan. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah:

Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional pada tahun n-

= -

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada triwulan IV atau mengikuti jadwal pelaksanaan Trade Expo Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan RI sehingga belum ada kegiatan di triwulan II.

III.3.2 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Triwulan II Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II terdiri dari 11 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.898.142.547,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.170.169.424,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 19,84%. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 9,74%, sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 55,42%.

Ket : Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Tabel. 23 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis II Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target TW II. 2025	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	55%	56,06%	101,93%	Rp. 248.093.195	96,21%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha baru berskala mikro	34 WUB	37 WUB	108,82%	Rp. 248.093.195	96,21%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	40 unit usaha	40 unit usaha	100%	Rp. 206.743.000	99,30%	Sangat Memuaskan

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

78	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	40 unit usaha	40 unit usaha	100%	Rp. 24.640.195	95,53%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	65unit usaha	66 unit usaha	101,54%	Rp. 16.710.000	70,04	Sangat Memuaskan
	Program Pengembangan UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro	6,36%	-	-	Rp. 35.597.400	82,17%	Capaian kinerja ditargetkan di triwulan IV
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan skala usaha mikro	7,77%	-	-	Rp. 35.597.400	82,17%	Capaian kinerja ditargetkan di triwulan IV
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusian, serta desain dan teknologi	13 unit usaha	-	-	Rp. 35.597.400	69,34%	Capaian kinerja ditargetkan di triwulan IV
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah peraturan bupati (perbup) kawasan industri yang ditetapkan	1dokumen	1dokumen	100%	Rp. 239.612.715	64,37%	Capaian kinerja ditargetkan di triwulan I
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 239.612.715	64,3%	Capaian kinerja ditargetkan di triwulan I
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan	1 Dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 223.947.715	79,39.%	Sangat Memuaskan

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	Sumber Daya Industri	pelaksanaan pembangunan sumber daya industri						
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen	-	-	Rp. 1.050.000	4,80%	Capaian kinerja ditriwukan III
	Sub kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 dokumen	-	-	Rp. 14.615.000	21, 40%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwukan III
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi nasional yang terkelola secara standar	15%	15 %	100%	Rp. 8.030.000	53,53%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri nasional (SINAS)	56,25%	44,44%	79,00%	Rp. 8.030.000	53,53%	Sangat baik
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 8.030.000	53,53%	Sangat Memuaskan

		nasional (SINAS)						
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	92,30%	91,43%	90,06%	Rp. 5.220.000	43,37%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	59,09%	58,33%	98,71%	Rp. 5.220.00	43,37%	Sangat Memusakan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 5.220.000	43,37%	Sangat Memuaskan
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	14,72%	15,94%	108,29%	Rp. -	- %	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan	13,41%	14,49%	108,05%	Rp. -	- %	Sangat Memuaskan

	koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi						
	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10 Unit usaha	10 Unit usaha	100%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	36,13%	35,14%	97,26%	Rp. 32.600.000	76,72%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	22,16%	23,24%	104,87%	Rp. 32.600.000	76,72%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	38 unit usaha	38 unit usaha	100%	Rp. 32.600.000	76,72%	Sangat Memuaskan
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	35,75%	-%	-%	Rp.-	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan III

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	55,81%	-%	-%	Rp. -	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan III
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	- unit usaha	- unit usaha	-%	Rp.-	-%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan III
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	6,75%	7,04%	104,30%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha	6,75	7,04%	104,30%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses	10 unit usaha	10 unit usaha	100%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan

	Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha						
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan omzet pedagang pasar vrakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi	10%	9,01%	90,01%	Rp. 601.016.114	11,71%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah prasarana/sarana distribusi perdagangan yang terfaatkan	-	-	-	Rp. 480.552.914	9,65%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	-	-	-	Rp. 480.552.914	9,65%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat DiWilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan	-	-	-	Rp, 120.463.200	79,78%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	-	-	-	Rp, 120.463.200	79,78%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan nilai Ekspor	15%	-11,74%	-78,27%	Rp. -	-%	Sangat Kurang

	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang	40%	-%	-%	Rp. -	-%	Sangat Kurang
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	-	-	-	-	-	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	-	-	-	-	-	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha ekspor yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	-	-	-	-	-	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	-	-	-	-	-	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan III

III.4.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- Program pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM merupakan program yang berkontribusi ke penanggulangan kemiskinan. Triwulan II Tahun 2025 telah menginfut diaplikasi sebanyak 37 wirausaha baru. Terhadap aspek pemberdayaan UMKM, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah melakukan fasilitasi dalam bentuk sosialisasi perizinan usaha kepada 40 UMKM dan pendataan terhadap usaha mikro dan kecil untuk triwulan II sebanyak

- 66 UMKM telah terinput ke dalam sistem ODS. Pendataan UMKM yang dilakukan secara kontinu setiap triwulan untuk mengukur sejauh mana data yang dihimpun dan diperbaharui secara akurat dan valid sehingga akan membantu perencanaan dan pengambilan keputusan pada sektor UMKM. Sementara untuk sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro capaian kinerja ditargetkan ditriwulan II.
- b. Program pengembangan UMKM dengan indikator rasio pertumbuhan skala usaha mikro untuk capaian kinerja ditetapkan ditriwulan IV. Pada program pengembangan usaha mikro merupakan program yang memfasilitasi bagi pelaku usaha dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi produk dalam rangka peningkatan daya saing produk dan pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kemampuan UMKM.
 - c. Program pengembangan ekspor, capaian kinerja kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar -11,74%. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya harga rata-rata Nikel. Untuk sub kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan ekspor yaitu pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota ditargetkan ditriwulan IV, sub kegiatan pembinaan pelaku usaha ekspor ditargetkan ditriwulan II dan untuk sub kegiatan pameran dagang capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV.
 - d. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi mencapai angka capaian kinerja sebesar 9,01%. Untuk sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan berupa revitalisasi sarana dan prasarana pasar ditargetkan ditriwulan III dengan alokasi sebanyak 7 (tujuh) pasar yang akan direvitalisasi. UPTD Pasar sebagai penyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berjalan secara maksimal dari segi minimnya aparatur ASN UPTD Pasar, belum adanya pengalokasian anggaran terkait peningkatan kapasitas pengelola pasar yang ada didesa/kecamatan. Penguatan kelembagaan, manajemen serta kapasitas pengelola pasar berpengaruh dalam peningkatan omzet pasar dan kesejahteraan pedagang.

1.3 Capaian Sasaran Staretgis 3

Melalui Sasaran 3 "Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah. Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah dapat terukur melalui capaian indikator persentase capaian kinerja program perangkat daerah. Triwulan II Tahun 2025, realisasi indikator sebesar 98,32% dari target kinerja sebesar 98% dengan capaian kinerja sebesar 100,33%.

- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Tabel. 24
Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	98%	98,32%	100,33%

Penjelasan :

Untuk triwulan II tahun 2025, realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 98,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98% dengan angka capaian kinerja 100,33%. Realisasi kinerja untuk Sasaran Strategis III dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah keseluruhan capaian kinerja kegiatan urusan perangkat daerah}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah}} \times 100\% \\
 & = \frac{884,89\%}{9} \times 100\% \\
 & = 98,32\%
 \end{aligned}$$

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW.II Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2024

Tabel. 25
Realisasi Indikator Sasaran III TW. II Tahun 2025
(dibandingkan realisasi TW II. tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi TW. II Tahun 2025	Realisasi TW. II Tahun 2024
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	98,32%	96,46%

Penjelasan :

Untuk triwulan II tahun 2025, realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 98,32% dan untuk triwulan II tahun 2024 capaian kinerja program sebesar 96,46% artinya ada peningkatan dibanding priode yang sama pada tahun 2024.

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. II Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel. 26
Realisasi Indikator Sasaran III TW. II Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi TW. II Tahun 2025	Target akhir renstra tahun 2026	Penjela
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	98,32%	100%	

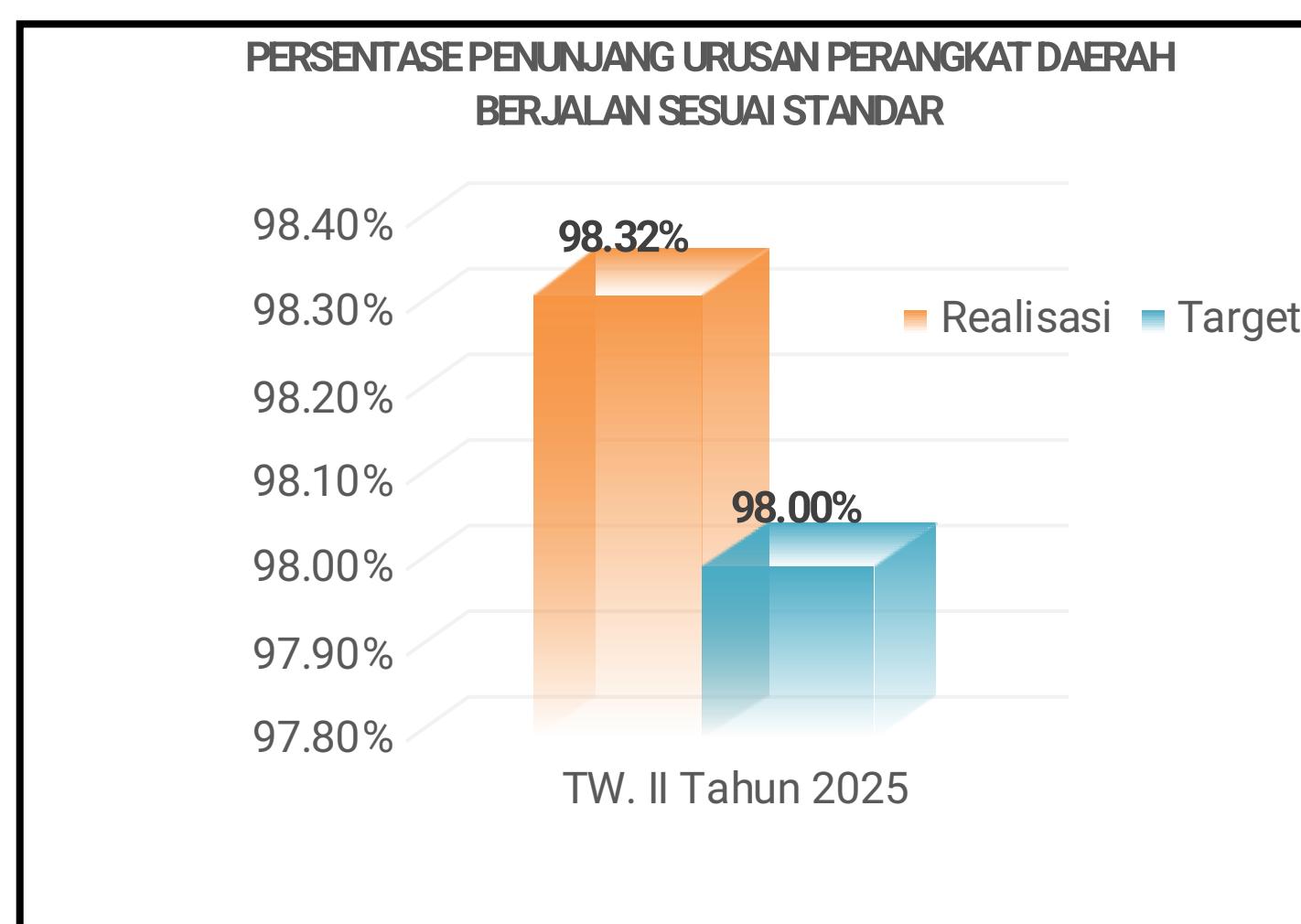
san:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 98,32%, maka realisasi yang diperoleh di triwulan II tahun 2025 masih perlu untuk ditingkatkan sebagaimana target Renstra yang ditetapkan dengan nilai sebesar 100%.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis III yaitu :

■ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran program adalah tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran. Indikator yang digunakan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar. Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk TW. II Tahun 2025 adalah sebesar 98%, terealisasi sebesar 98,32% dengan capaian kinerja 100,33% dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :



Rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dengan indikator kinerja yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu. Tahun 2025, terealisasi 100% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu dari target 100%. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi}}{\text{= 4 dokumen}} \times 100\% \\
 & \frac{\text{= 4 dokumen}}{\text{= 100\%}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya administrasi keuangan dengan baik dengan indikator kinerja yaitu persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi kegiatan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% (**predikat kinerja sangat memuaskan**) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Jumlah laporan keuangan yang diterbitkan

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah laporan keuangan yang diterbitkan}}{\text{= 7 dokumen}} \times 100\% \\
 & \frac{\text{= 7 dokumen}}{\text{= 100\%}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen barang milik daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar. Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah target kinerja tahun 2025 sebanyak 2 dokumen laporan penatausahaan barang yang disusun berdasarkan laporan penyusunan asset dan inventaris barang yang dilakukan 2 (dua) semester per tahun dengan realisasi kinerja sebanyak 2 laporan. Untuk tahun 2025 pencapaian kinerja ditargetkan ditriwulan I dan triwulan IV. Realisasi kinerja untuk sub kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan formula sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah BMD yang diadministrasikan sesuai standar}}{\text{Jumlah BMD yang telah diadministrasikan}} \times 100\%$ $= \frac{1 \text{ laporan}}{1 \text{ laporan}} \times 100\%$ $= 100\%$	$\times 100\%$
--	----------------

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tercapainya target pendapatan perangkat daerah dengan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi terhadap target ditriwulan I sebesar 1 laporan dengan capaian kinerja sebesar 100%. **(predikat kinerja memuaskan).** Pada kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD dengan formula sebagai berikut :

Jumlah laporan pendapatan daerah tahun
n-

Jumlah target laporan pendapatan daerah X 100%
pada triwulan tahun n-

= 1 dokumen
----- X100%
1 dokumen
= 100%

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi terhadap target di triwulan II tahun 2025 sebesar 3 laporan (capaian kinerja 100%). **Predikat kinerja memuaskan.** Indikator kinerja pencapaian yaitu persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur yaitu :

realisasi kinerja administrasi kepegawaian
perangkat daerah
X 100%

target kinerja administrasi kepegawaian
perangkat daerah

= 3 laporan

————— X100%

3 laporan

= 100%

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi umum perangkat daerah. Target kinerja yang ditetapkan untuk kegiatan ditriwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan realisasi 93,51% (capaian kinerja 93,51%). **Predikat kinerja Sangat Memuaskan.** Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{rata-rata realisasi kinerja administrasi}}{\text{umum perangkat daerah}} \\
 & \frac{\text{rata-rata target kinerja administrasi umum}}{\text{perangkat daerah}} \times 100\% \\
 & = \frac{93,51}{100} \times 100\% \\
 & = 93,51
 \end{aligned}$$

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Untuk kegiatan tersebut pencapaian kinerja ditargetkan ditriwulan II tahun 2025. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah pengadaan BMD}}{\text{Jumlah rencana kebutuhan}} \times 100\% \\
 & \frac{\text{Pengadaan BMD}}{\text{}} \\
 & = -
 \end{aligned}$$

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 91,38% (capaian 91,38%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{rata-rata realisasi kinerja penunjang urusan}}{\text{pemerintahan daerah}} \times 100\% \\
 & \frac{\text{rata-rata target kinerja penunjang urusan}}{\text{pemerintahan daerah}} \times 100\% \\
 & = \frac{91,38}{100} \\
 & = 91,38\%
 \end{aligned}$$

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah. Target kinerja pada kegiatan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% (capaian kinerja 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah BMD yang}}{\text{telah dipelihara}} \times 100\% \\
 & \frac{\text{Jumlah kebutuhan pemeliharaan BMD}}{} \\
 & = \frac{22 \text{ unit}}{22 \text{ unit}} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Ket
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	100%	Sangat Memuaskan	

	Daerah			
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,51%	Sangat Memuaskan	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,38%	Sangat Memuaskan	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
		884,89%	Memuaskan	

Pencapaian indikator Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah keseluruhan Capaian kinerja kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh Kegiatan}} \times 100\% = 4884,89\%$$

$$\frac{9}{9} \times 100\% = 98,32\%$$

Secara umum pencapaian kinerja program, sebagai berikut :

No	PROGRAM	TARGET KINERJA TW II. TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TW. II TAHUN 2025	% CAPAIAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98%	98,32%	100,33%
RATA-RATA				100,33%

Sub Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis III pada TW. II Tahun 2025:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu. Realisasi indikator sasaran sub kegiatan ini untuk TW. II Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen (persen capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah dokumen perencanaan = Jumlah dokumen perencanaan disusun yang disusun tepat waktu tepat waktu pada triwulan (n)

= 1 dokumen

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1	100%	

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu. Pencapaian kinerja ditargetkan di triwulan II dan III

Indikator dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah dokumen RKA-SKPD = Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun yang tepat waktu disusun tepat waktu pada triwulan (n)

= 1 Dokumen

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan penyusunan RKA-SKP	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1	100	

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen DPA-SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu. Realisasi indikator sasaran sub kegiatan ini untuk TW. II Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen DPA-Perubahan 2025 (persen capaian 0%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah dokumen DPA-SKPD = Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu disusun tepat waktu pada triwulan (n)

= 0 dokumen

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	1	0	0%	

4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang dilengkapi dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun. Realisasi indikator kinerja

TW. II Tahun 2025 yaitu sebanyak 2 laporan, berupa laporan Evaluasi Monev RKPD Triwulan II Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025, dengan persentase capaian sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator dari sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah laporan evaluasi kinerja = Jumlah laporan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah pelayanan perangkat daerah yang disusun yang disusun pada triwulan (n)
= 2 laporan

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	laporan	2	2	100%	

5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran sub kegiatan adalah terbayarnya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Target Kinerja TW. II Tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 28 orang. Dengan realisasi 28 orang (Capaian Kinerja adalah 100%). Indikator dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya = Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan
Pada triwulan (n)
= 28 orang

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Orang	28	28	100%	

6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran. Target Kinerja TW. II Tahun 2025 untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD adalah 3 laporan. Realisasi kinerja sebanyak 3 laporan sehingga capaian kinerja adalah 100%. Indikator dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah laporan keuangan} &= \text{Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD bulanan/triwulanan/semesteran} \\ &\quad \text{SKPD yang disusun pada triwulan} \\ (n) &= 3 \text{ laporan} \end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semestera n SKPD yang disusun	laporan	3	3	100 %	

7. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD. Pencapaian kinerja Tahun 2025 ditargetkan ditriwulan II sebanyak 1 laporan dan realisasi 1 laporan atau capaian 100% san. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun	dokumen	1	1	100%	

8. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah. Target Kinerja TW. II Tahun 2025 untuk sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah 1 dokumen. Realisasi sebanyak 1 dokumen (Capaian Kinerja adalah 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Dokumen	1	1	100 %	

9. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan data administrasi kepegawaian, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan, Realisasi indikator kinerja untuk TW. II Tahun 2025 sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen (persen capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator dari sub kegiatan pendataan dan pengolahan data administrasi kepegawaian dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah laporan data administrasi = Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan kepegawaian yang dimutakhirkan
= 3 dokumen

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawai an	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	dokumen	3	3	100%	

10. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI. Sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan untuk sub kegiatan tersebut ditargetkan sebanyak 2 ASN yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan realisasi 2 (dua) orang atau capaian 100% dengan predikat **sangat memuaskan**.

Indikator dari sub kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah ASN yang lulus diklat} &= \text{jumlah ASN yang lulus diklat} \\
 \text{berdasarkan tugas dan fungsi} & \quad \text{berdasarkan tugas dan fungsi} \\
 &= 2 \text{ orang}
 \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI	orang	2	2	100%	

11. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Sesuai rencana aksi kegiatannya dilaksanakan di triwulan II sebanyak 2 orang dari target 3 capaian 66,67% orang atau **predikat kinerja Baik**, Capaian kinerja digambarkan pada tabel dibawah :

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	3	2	66,67%	

12. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target Kinerja triwulan II tahun 2025 adalah 11 Jenis. Realisasi 11 Jenis sehingga capaian kinerja adalah 100%.

Predikat kinerja sangat memuaskan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah komponen instalasi	jenis	11	11	100%	

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan					
--	---	--	--	--	--	--

13. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk triwulan II tahun 2025 adalah 100%. Target untuk satu tahun ditetapkan di triwulan I sebanyak 4 paket, yang terealisasi sebanyak 4 paket.

Predikat kinerja sangat memuaskan.

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	4	100%	

14. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran kegiatan adalah tersedianya bahan logistik kantor. Target kinerja triwulan II tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor 20 paket sedangkan realisasi 20 paket. Sehingga Capaian Kinerja adalah 100%.

Predikat kinerja sangat memuaskan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	paket	20	20	100%	

15. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan cetakan dan penggandaan.

Target kinerja triwulan II tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan bahan

cetakan dan penggandaan 3 paket sedangkan realisasi 1 paket. Sehingga Capaian Kinerja adalah 33,33 %. **Predikat kinerja kurang.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	3	1	33,33 %	

16. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target Kinerja ditriwulan II tahun 2025 sebanyak 60 dokumen untuk sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60 dokumen sedangkan realisasi 60 dokumen. Sehingga capaian kinerja adalah 100 %. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	60	60	100 %	

17. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya tamu kantor. Untuk triwulan II 2025 ditetapkan target kinerja sesuai rencana aksi yang diperjanjikan pada triwulan II 2 laporan dan realisasi sebanyak 2 laporan dengan capaian 100%

dengan **predikat kinerja Sangat memuaskan**. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	laporan	2	2	100%	

18. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Capaian kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar 84,62%. Target triwulan I tahun 2025 adalah 65 laporan yang terealisasi di sebanyak 55. **Predikat kinerja memuaskan.**

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	laporan	65	55	84,62%	

19. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah. Triwulan II Tahun 2025, terealisasi 13 dokumen arsip dinamis yang diadministrasikan dari target 13 dokumen. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

URAIAN						KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis yang di administrasikan	dokumen	13	13	0%	
--	--	---------	----	----	----	--

20. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya mebel kantor. Sesuai rencana aksi target kinerja ditetapkan ditriwulan II tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja masih 0% ini dikarenakan aplikasi E-katalog belum bisa digunakan pada triwulan II. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	1	0	0%	

21. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya peralatan kantor dan mesin lainnya. Sesuai rencana aksi target kinerja ditetapkan ditriwulan II tahun 2025 sehingga pencapaian kinerja masih 0% karena belanja melalui e-Katalog belum bisa digunakan karena masih dalam proses pemulihan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	unit	4	0	0%	

22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran sub kegiatan adalah tertatanya surat masuk dan surat keluar. Target kinerja triwulan II tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah 375 laporan yang terealisasi 342 laporan atau dengan capaian 91,20%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	laporan	375	342	91,20%	

23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya jasa listrik dan air kantor. Target kinerja triwulan II tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah 4 laporan dengan realisasi kinerja sebanyak 4 laporan. Capaian kinerja sebesar 75%. **Predikat sangat memuaskan.** Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	KET	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	4	4	100%	

24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor. Target Kinerja triwulan II tahun 2025 sebanyak 4 laporan dengan realisasi kinerja sebanyak 4 laporan. Capaian Kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	4	4	100%	

25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional. Target Kinerja triwulan II tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah 10 Unit yang terealisasi sebanyak 10 unit. Capaian kinerja 100%. **Predikat sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	10	10	100%	

26. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan mesin kantor. Target Kinerja triwulan II tahun 2025 untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah 11 unit, yang terealisasi sebanyak 11 unit.

Sehingga capaian kinerja adalah 100%. **Predikat kinerja memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11	11	100%	

27. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dan/atau bangunan lainnya. Target Kinerja untuk sub kegiatan tersebut ditetapkan ditriwulan II sesuai dengan rencana aksi yang diperjanjikan. Sehingga pencapaian kinerja masih 100%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	100%	

III.4.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- Terkait target kinerja untuk sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan akhir triwulan II 2025 belum realisasi karena belanja melalui E-Katalog belum bisa dikarenakan mamakai sistem E-Katalog persi terbaru.
- Sub kegiatan penatausahaan Arsip Dinamis pad SKPD dengan capaian kinerja sebesar 0%. karena alat dan bahannya dibelanja melalui E-katalog

tapi sampai triwulan II belanja lewat E-Katalog belum bisa dengan persi terbaru sehingga menunggu sampai triwulan III

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan pada Urusan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
S.D Triwulan II Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Permasala han	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3*100	(6)	(7)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.366.500.678	2.212.292.982	65,71		
II	KEGIATAN PERENCANAAN PENGGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	34.887.650	8.750.000	25,08		
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.508.600	8.750.000	49,98		

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.248.650	-	-		
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1.547.500	-	-		
4.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.582.900	-	-		
III	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.945.149.718	1.933.471.154	65,65		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.902.015.742	1.918.979.154	66,13		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	43.133.976	14.492.000	33,60		
IV	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	16.087.500	12.780.000	79,44		
1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.087.500	12.780.000	79,44		
V	KEGIATAN ADMINISTASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	4.329.000	2.500.000	57,75		
1.	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.329.000	2.500.000	57,75		
VI	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	36.208.500	13.730.000	37,92		
1.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi	6.000.000	5.000.000	83,33		

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	Kepegawaian					
2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.512.500	-	-		
3.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undagan	19.696.000	8.730.000	44,32		
VII	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	142.787.560	133.365.374	93,40		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.678.000	1.333.000	49,78		
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600.000	-	-		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.271.760	2.266.600	99,77		
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.826.600	2.000.000	52,27		
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000	3.525.000	89,02		
6.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.025.000	3.740.000	92,92		
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.006.200	110.500.774	98,66		
8.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.420.000	10.000.000	74,52		
VIII	KEGIATAN PENGADAAN BARANG	42.900.000	-	-		

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	8.400.000	-	-		
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	-	-		
IX	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	70.640.750	53.572.454	75,84		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.860.750	-	-		
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000	32.322.454	86,89		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.580.000	21.250.000	71,84		
X	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	73.510.000	54.124.000	73,63		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.350.000	16.814.000	57,29		
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.160.000	7.310.000	51,62		
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	100		
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN	21.523.850	-	-		

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	PINJAM					
I	PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.523.850	-	-		
	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21.523.850	-			
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	42.490.200	32.600.000	76,72		
I	KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTANNYA DLM DAERAH KAB/KOTA	42.490.200	32.600.000	76,72		
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.490.200	32.600.000	76,72		
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	-		
I	KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM	-	-	-		

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	KOPERASI YG WILAYAH KEANGGOTANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA					
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-		
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	26.527.100	-	-		
I	KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.527.100	-	-		
1.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	26.527.100	-	-		
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	257.859.000	248.093.195	96,21		
I	KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN,KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DGN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	257.859.000	248.093.195	96,21		
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	25.792.000	24.640.195	95,53		

2.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	208.210.000	206.743.000	99,30		
3	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	23.857.000	16.710.000	70,04		
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	43.320.000	35.597.400	82,17		
I	KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	43.320.000	35.597.400	82,17		
1.	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	43.320.000	35.597.400	82,17		
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.130.984.164	601.016.114	11,71		
I	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.979.984.164	480.552.914	9,65		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.979.984.164	480.552.914	9,65		
II	KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	151.000.000	120.463.200	79,78		
1.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	151.000.000	120.463.200	79,78		

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

IX	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	414.124.100	247.605.100	59,79		
I	KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOCK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KAB/KOTA	400.575.100	235.670.700	58,83		
1.	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	40.709.200	25.120.000	61,71		
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	369.865.900	210.550.700	58,51		
II	KEGIATAN PENGAWASAN PUPUK DAN PASTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	13.549.000	11.934.400	88,08		
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	13.549.000	11.934.400	88,08		
X	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	21.148.000	-	-		
I	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YG	21.148.000	-	-		

	TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.	Sub Kegiatan Pamara Dagang Nasional	-	-	-		
2.	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	21.148.000	-	-		
3.	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	-	-	-		
4	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	-	-	-		
XI	PROGRAM STANDARDINASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	63.134.000	20.565.450	32,57		
I	KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN	63.134.000	20.565.450	32,57		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi, Legal Berupa Tera, Tera Ulang	63.134.000	20.565.450	32,57		
XII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	372.254.216	239.612.715	64,37		
I	KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	372.254.216	239.612.715	64,37		
1.	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	68.298.416	14.615.000	21,40		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	282.079.300	223.947.715	79,39		

3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	21.876.500	1.050.000	4,80		
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	12.035.183	5.220.000	43,37		
I	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	12.035.183	5.220.000	43,37		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	12.035.183	5.220.000	43,37		
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.000.834	8.030.000	53,53		
I	KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	15.000.834	8.030.000	53,53		
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	15.000.834	8.030.000	53,53		

	Industri Nasional (SII Nas)						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

BAB IV**PENUTUP****4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab. III Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada triwulan II tahun 2025, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	- Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	98%
2	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	- Pertumbuhan nilai produksi IKM - Pertumbuhan nilai produksi UMKM - Persentase Koperasi aktif - Pertumbuhan sub sektor perdagangan	0,15% 10,29% 80,00% 12,5%

121	3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	- Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	98%
-----	---	--	---	-----

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, rata-rata nilai capaian indikator adalah 44,96%.

Akuntabilitas Keuangan

Dari 5 Sasaran Strategis tersebut yang telah didukung oleh program dengan anggaran masing-masing program diperoleh diperoleh data rata-rata penyerapan anggaran pada semua sasaran strategis adalah 37,30%.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, diharapkan :

- Adanya dukungan berupa kerjasama dari seluruh ASN dan Upah Jasa Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
- Peningkatan penyampaian informasi 1 (satu) data.
- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.

4.3 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Triwulan II Tahun 2025 tidak ada dokumen hasil evaluasi akuntabilitas Instansi Pemerintah dan di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

***Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian***

Triwulan II Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Selaraskan Indikator Kinerja Kepala Dinas dalam PK dengan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi	Keselarasan Indikator kinerja akan dilakukan perbandingan dan perbaikan	Telah melakukan Perbaikan Indikator Kinerja agar selaras antara PK dengan SKP
2	Selaraskan Indikator Kinerja Kepala Bidang, Kasubbid, dalam PK dengan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi dan SKP	Pada penyusunan PK dan Rencana aksi dan SKP tidak Selaras sehingga perlu ada perbaikan agar ada kelarasan.	Telah memperbaiki keselarasan indikator kinerja Kepala Bidang antara PK dan SKP
3.	Publikasikan dokumen perencanaan dan laporan Kinerja di website OPD/PPID	Diusahakan untuk mempublikasikan setiap Laporan Kinerja OPD pada Admin PPID	Telah diserahkan kepada Admin PPID untuk dipublikasikan pada website PPID.

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN